

**REVITALISASI KEARIFAN LOKAL
DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
BAGI UMAT HINDU DI BALI**



Oleh

Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
2013**

**REVITALISASI KEARIFAN LOKAL
DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
BAGI UMAT HINDU DI BALI**



Oleh

Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
2013**

KATA PENGANTAR

Atas *asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah penelitian yang berjudul "Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Beragama di Bali". Tersusunnya penelitian ini atas peran serta dan kerja sama berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.Ida Bagus Gede Yudha Triguna, M.S. sebagai Dirjen Bimas Hindu, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana, fasilitas dan dukungan moril.
2. Rektor IHDN Denpasar yang telah memperikan ijin dalam melakukan penelitian ini.
3. Para informan yang telah banyak meluangkan waktu dalam pencarian data, serta semua pihak yang membantu, terutama saudara-saudara sejawat yang rela memberikan dukungan moril yang tak ternilai harganya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna kesempurnaan penelitian ini..

Om santih , santih , santih Om

Denpasar, 1 Desember 2013

Peneliti,

ABSTRAK

Kearifan lokal adalah nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Kearifan lokal yang bersumber dari nilai budaya itu dimanfaatkan untuk menata kehidupan komunitas. Tatanan kehidupan berkenaan dengan interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan alam, dan interaksi dalam masyarakat. Itu berarti ada norma, aturan, dan etika yang harus diikuti oleh manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta agar diberikan berkat kepada semua umat manusia. Dalam perjalanan kemajuan bangsa, pemahaman hubungan manusia dengan Sang Pencipta telah mengalami perubahan yang sangat besar dengan masuknya agama-agama modern ke Nusantara. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam hubungannya dengan Sang Pencipta bukan lagi hanya berasal dari tradisi budaya religi asli, tetapi telah diperkaya untuk tidak digantikan oleh agama yang kita anut sekarang ini, yang datang dari peradaban asing.

Bali sebagai bagian dari Indonesia, pulau yang kecil tetapi amat dikenal dunia, berkat kebudayaannya melalui komunikasi pariwisata, tak dapat menjauhkan diri dari arus globalisasi. Bali telah terkenal dengan kebudayaannya karena keunikannya, kekhasannya yang tumbuh dari jiwa agama Hindu yang tidak dapat dipisahkan dari keseniannya, dalam masyarakat yang berciri sosial religius. Oleh karena itu perlu melestarikan kebudayaan bangsa itu dengan kreativitas serta mengembangkannya mengikuti kemajuan. Salah satu bentuk kreatifitas kehidupan budaya adalah dengan melakukan revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama di Bali.

Salah satu fenomena yang terjadi di Bali adalah bahwa telah terjadi arah perkembangan yang menjauhi akar-akar budaya, adat, dan agama Hindu. Arah perkembangan ini lebih banyak didukung oleh kelompok sosial yang lebih mengutamakan dorongan dan pertimbangan ekonomis dan iptek (material semata-mata) yang mengabaikan topangan-topangan sosial, budaya dan agama. Di samping itu masyarakat Bali semakin berkembang kearah hiterogenisasi dan divergensi; etnik-etnik nusantara semakin banyak bermukim di Bali, serta budaya asing semakin invasive memasuki masyarakat Bali.

Berdasarkan fenomena di atas, dengan melihat perkembangan baru, dimana kaum muda Bali mulai mempersiapkan diri untuk memasuki pasca-persimpangan jalan, khususnya kegairahan untuk merekonstruksi serta melakukan revitalisasi dalam pemahaman kearifan lokal, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: "Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Beragama Bagi Umat Hindu di Bali".

Penelitian ini dibimbing oleh tiga masalah yaitu; (1) bagaimana persepsi masyarakat terhadap kearifan lokal, (2) bagaimana bentuk kearifan lokal di Bali, dan (3) apakah fungsi revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama di Bali. Kemudian masalah penelitian dibedah dengan tiga teori masing-masing teori fenomenologi, teori semiotik, dan teori interaksionisme simbolik.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah; (1) Persepsi masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu telah menyadari bahwa kearifan lokal telah banyak

terlupakan, namun sampai saat ini telah banyak upaya untuk mempertahankan hal itu melalui berbagai aktivitas seperti penusunan awig-awig desa pakraman, mengoptimalkan pelaksanaan upacara-upacara agama dengan berbagai tradisi yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi pengaruh globalisasi yang melanda generasi muda sebagai pewaris budaya.(2) Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Bali saat ini sangat banyak seperti; (a) budaya zaman, (b) budaya rendah diri bukan rendah hati. (c) budaya pemaaf dan mengakui kelebihan orang lain. (d) budaya berbuat baik itu baik. (e) budaya menghargai waktu. Bentuk ini juga banyak dijumpai dalam lagu-lagu Bali. (f) budaya pengakuan hak dan kewajiban. (3) Fungsi revitalisasi kearifan lokal adalah (a) fungsi (b) fungsi kesejahteraan (c) fungsi pelestarian (d) fuungsi pendidikan.

Kata Kunci: Revitalisasi, Kearifan lokal, Kehidupan beragama.

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel dan Grafik.....	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Umum.....	7
1.3.2. Tujuan Khusus	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoretis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Fenomenologi.....	11
2.1.2 Teori Semiotik.....	13
2.1.3 Teori Interaksionisme Simbolik.....	14
2.2 Kerangka Berpikir.....	15
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 18
3.1 Lokasi Penelitian.....	18
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.2.1 Jenis Data.....	18
3.2.2 Sumber Data.....	18
3.3 Instrumen Penelitian.....	19
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5.1 Observasi.....	20
3.5.2 Wawancara Mendalam.....	21
3.5.3 Studi Kepustakaan dan Dokumentasi.....	21
3.6 Teknik Analisis Data.....	22
3.7 Teknik Penyajian Hasil Penelitian.....	22

BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Daerah Bali.....	24
4.1.1 Kondisi Geografis.....	24
4.1.2 Penduduk menurut Agama.....	29
4.1.3 Kondisi Sosial.....	39
4.1.4 Agama dan Kebudayaan.....	41
4.1.4.1 Agama.....	41
4.1.4.2 Kebudayaan Bali.....	49
4.1.5 Sistem Sosial.....	54
4.1.6 Sistem Kemasyarakatan.....	55
4.1.6.1 Desa Adat (Desa Pakraman).....	55
4.1.6.2 Banjar.....	62
4.1.7 Sistem Kekerabatan.....	66
4.1.7.1 Struktur Keluarga.....	75
4.1.7.2 Eksistensi Klen Dalam Masyarakat Bali.....	77
4.1.8 Sistem Pelapisan Masyarakat Bali.....	79
4.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Kearifan Lokal di Bali.....	82
4.3 Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal di Bali.....	91
4.3.1 Budaya Zaman.....	92
4.3.2 Budaya Rendah Hati Bukan Rendah Diri.....	96
4.3.3 Budaya Pemaaf dan Mengakui Kelebihan Orang Orang Lain...	97
4.3.4 Budaya Berbuat Baik itu Baik.....	98

4.3.5	Budaya menghargai waktu.....	101
4.3.6	Budaya Pengakuan Hak dan Kewajiban Azasi.....	103
4.4 Fungsi Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidup Beragama		
	Di Bali.....	107
4.4.1	Fungsi Kedamaian.....	108
4.4.2	Fungsi Kesejahteraan.....	111
4.4.3	Fungsi Pelestarian	115
4.4.4	Fungsi Pendidikan.....	118
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		121
5.1	Simpulan	121
5.2	Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Grafik	4.1	Presentase Luas Wilayah Menurut Kab/Kota	27
Grafik	4.2	Ketinggian Ibu Kota/Kab. Di Provinsi Bali	28
Tabel	4.1	Banyaknya Penduduk Menurut Kab/Kota dan Agama di Bali	29
Tabel	4.2	Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Jenis kelamin Tahun 2011--2015	32
Tabel	4.3	Tingkat Hitrogenitas Penduduk Bsli dari Segi Agama (kecuali Hindu	33
Tabel	4.4	Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kab/Kota di Bali Tahun 2011	35
Tabel	4.5	Banyaknya Pemuka Agama Menurut Agama dan Kab. Di Bali	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Daftar Informan

Lampiran 02. Daftar Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Warisan budaya leluhur sebagai kearifan lokal sebenarnya memiliki potensi pasar yang besar, namun sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian terutama diakibatkan kekurangtahuan para pengambil kebijakan. Upaya pelestarian warisan budaya selama ini dirasa miskin kreasi-kreasi baru sehingga masyarakat kurang mengapresiasi warisan budayanya sendiri. Industri kreatif dapat berperan dalam menciptakan kreasi yang lebih modern dan kontemporer sehingga tidak hanya masyarakat dalam negeri saja yang dapat menikmati, namun juga masyarakat internasional.

Bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk hal ini, karena dapat memanfaatkan tradisi lisan atau tradisi budaya yang ada di Indonesia untuk bangkit dan menjadi ikon industri budaya di negeri sendiri dan di mata dunia untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Dengan demikian sangat diperlukan sinergi dan kerja sama dari pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat pemilik tradisi budaya Indonesia untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi kreatif dan industri kreatif.

Tradisi budaya dan tradisi lisan yang sangat kaya itu perlu dilindungi bersamaan dengan usaha revitalisasi dalam komunitasnya dan pemanfaatannya menjadi industri budaya kreatif untuk mendapatkan ekonomi rakyat. Pemecahan

masalah tentang perlindungan kekayaan budaya dan kekayaan intelektual juga perlu dicarikan agar kekayaan budaya dan kekayaan intelektual bangsa kita benar-benar terlindungi. Perlindungan kekayaan budaya dan kebudayaan intelektual dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan para pemilik, pengarang, dan penemu untuk menciptakan karya budaya dan karya intelektual serta menyediakannya kepada publik.

Tradisi budaya atau tradisi lisan selalu mengalami transformasi akibat perkembangan zaman dan akibat penyesuaiannya dengan konteks zaman. Kehidupan sebuah tradisi pada hakekatnya berada pada proses transformasi itu karena sebuah tradisi tidak akan hidup kalau tidak mengalami transformasi. Dalam tradisi budaya yang mengalami transformasi terdapat inovasi akibat persinggungan sebuah tradisi dengan modernisasi atau akibat penyesuaiannya dengan konteks zaman. Kemampuan penyesuaian tradisi budaya dengan modernisasi atau konteks zaman merupakan kedinamisan sebuah tradisi.

Atas dasar itu, kebudayaan bersifat dinamis. Sifat dinamis semacam itu ditandai dengan perubahan dan perkembangannya sesuai dengan konteks dan gelombang zaman. Kedinamisan kebudayaan itu dipengaruhi oleh kemampuan manusia sebagai penciptanya. Kebudayaan menjadi pola hidup (*way of life*) bermasyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kebudayaan nenek moyang sudah berbeda dengan kebudayaan sekarang ini.

Kearifan lokal adalah nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Kearifan lokal yang bersumber dari nilai budaya itu dimanfaatkan untuk menata kehidupan komunitas. Tatanan kehidupan berkenaan dengan interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan alam, dan interaksi dalam masyarakat. Itu berarti ada norma, aturan, dan etika yang harus diikuti oleh manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta agar diberikan berkat kepada semua umat manusia. Dalam perjalanan kemajuan bangsa, pemahaman hubungan manusia dengan Sang Pencipta telah mengalami perubahan yang sangat besar dengan masuknya agama-agama modern ke Nusantara. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam hubungannya dengan Sang Pencipta bukan lagi hanya berasal dari tradisi budaya religi asli, tetapi telah diperkaya untuk tidak digantikan oleh agama yang kita anut sekarang ini, yang datang dari peradaban asing.

Kearifan lokal merupakan milik manusia yang bersumber dari nilai budayanya sendiri dengan menggunakan akalbudi, pikiran, hati, dan pengetahuannya untuk bertindak dan bersikap terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Manusia selalu memiliki dua ruang interaksi yakni lingkungan alam dan lingkungan sosial. Menghadapi dua ruang interaksi itu pada umumnya manusia memiliki kearifan dari tiga sumber yaitu dari nilai budaya yang kita sebut dengan kearifan lokal, dari aturan pemerintah yang lebih modern, dan dari agama. Dengan tiga sumber kearifan itu, manusia menjalani kehidupannya dalam ruang interaksi lingkungan dengan alam dan lingkungan sosial. Pada gilirannya, kedua ruang interaksi itu memproduksi nilai dan

norma budaya baru yang berlaku pada komunitasnya dan yang berbeda dengan nilai budaya pada komunitas budaya lainnya.

Nilai budaya semacam itu menjadi kearifan lokal baru yang telah mengalami transformasi. Nilai-nilai tersebut cukup arif sebagai landasan hubungan manusia dengan manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Oleh karena itulah, kearifan lokal merupakan nilai dan norma budaya yang menjadi acuan tingkah laku manusia untuk menata kehidupannya. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai dan norma budaya yang berlaku dalam menata kehidupan masyarakat. Nilai dan norma yang diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Sangat beralasan jika Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi nilai dan norma budaya untuk kedamaian dan kesejahteraan dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun masyarakat. (Sibarani, 2012:129).

Bali sebagai bagian dari Indonesia, pulau yang kecil tetapi amat dikenal dunia, berkat kebudayaannya melalui komunikasi pariwisata, tak dapat menjauhkan diri dari arus globalisasi. Bali telah terkenal dengan kebudayaannya, oleh karena keunikannya, kekhasannya yang tumbuh dari jiwa agama Hindu yang tidak dapat dipisahkan dari keseniannya, dalam masyarakat yang berciri sosial religius. Oleh karena itu perlu melestarikan kebudayaan bangsa itu dengan kreativitas serta mengembangkannya mengikuti kemajuan. Salah satu bentuk kreatifitas kehidupan budaya adalah dengan melakukan revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama di Bali. Revitalisasi

kearifan lokal yang dimaksud adalah : kerja keras, disiplin, pendidikan, kesehatan, gotong royong, pengelolaan gender, pelestarian dan kreativitas budaya, peduli lingkungan, kedamaian, kesopansantunan, kejujuran, kesetiakawanan, kerukunan dan penyelesaian konflik, komitmen, pikiran positif, rasa syukur dan lainnya.

Fenomena yang terjadi di Bali sebagaimana yang disampaikan oleh Naya Sujana dalam tulisannya berjudul “Manusia Bali di Persimpangan Jalan”(1994), bahwa saat ini telah terlihat adanya dua arah perkembangan masyarakat Bali yang saling terpisah yaitu, (1) arah perkembangan yang menjauhi akar-akar budaya, adat, dan agama Hindu. Arah perkembangan ini lebih banyak didukung oleh kelompok sosial yang lebih mengutamakan dorongan dan pertimbangan ekonomis dan iptek (material semata-mata) yang mengabaikan topangan-topangan sosial, budaya dan agama. Di samping itu masyarakat Bali semakin berkembang ke arah heterogenisasi dan divergensi; etnik-etnik nusantara semakin banyak bermukim di Bali, serta budaya asing semakin invasive memasuki masyarakat Bali. (2) arah perkembangan yang mendekati akar-akar budaya Bali dengan tujuan untuk melestarikan dan mengendalikan budaya, adat, dan agama Hindu, namun belum ditemukan berbagai pendekatan yang sesuai dan aplikatif atas perubahan yang terjadi. Untuk sementara dapat disebut sebagai gerakan revitalisasi budaya (*cultural revitalization*). Kelompok ini ingin memberikan aliran daya budaya yang lebih kuat ke dalam masyarakat Bali, agar masyarakat kembali mengokohkan budaya, adat, dan agama Hindu.

Untuk menemukan berbagai aspek difungsi budaya (*cultural dysfunctional*) dalam proses perubahan dan pergeseran budaya sekarang ini, maka ada beberapa

fenomena social penting yang dapat dianggap mengancam dan mengarah kepada akar-akar budaya Bali sebagaimana kutipan di bawah ini.

“(1) munculnya konflik social dan budaya dalam masyarakat Bali, bahwa masyarakat Bali dewasa ini mengalami konflik yang mendalam, baik laten maupun manifest. (2) munculnya berbagai penyimpangan sosial (*social deviance*) dalam masyarakat. Dalam hal ini budaya Bali semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan social masyarakat dan kurang mampu mengendalikan pola-pola perilaku warganya, sehingga muncul penyimpangan dan penyakit sosial. (3) munculnya peralihan batiniah di kalangan manusia Bali sendiri. Ini berarti bahwa budaya, adat, dan agama semakin kurang mampu memenuhi kebutuhan internal warganya. (4) adanya proses sekularisasi yang berjalan secara universal baik di Barat maupun di Timur. (5) erosi identitas budaya (*the erosion of cultural identity*) dan jati diri. (6) adanya gejala disfungsi dari struktur social. (7) melemahnya manusia Bali dalam mempertahankan citra budaya (*cultural image*) yang berkaitan dengan nilai-nilai kemuliaan sosial dan agama. Naya Sujana dalam Pitana (1994:62-63).

Berdasarkan fenomena di atas, dengan melihat perkembangan baru, dimana kaum muda Bali mulai mempersiapkan diri untuk memasuki pasca-persimpangan jalan, khususnya kegairahan untuk merekonstruksi serta melakukan revitalisasi dalam pemahaman kearifan lokal, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Beragama Bagi Umat Hindu di Bali”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. .Kurangnya pemahaman masyarakat terutama umat Hindu terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat.
2. Ketidak berdayaan norma-norma hukum yang ada dalam mengatasi berbagai konflik internal maupun eksternal dalam kehidupan beragama di Bali.
3. Perlu memahami fungsi revitalisasi kearifan lokal dalam menanggulangi konflik-konflik sosial keagamaan di Bali.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini memfokuskan diri untuk mengkaji revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Bali. Sebagai *building block* penelitian ini dibimbing oleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat Hindu di Bali ?.
2. Bagaimanakah bentuk kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat Hindu di Bali ?.
3. Apakah fungsi revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat Hindu di Bali ?.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah ,

1. Untuk mengungkap, mengkaji dan mensosialisasikan nilai dan norma yang ada dalam kearifan lokal, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan beragama, baik secara individu, kelompok, maupun oleh para pemimpin yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan.
2. Penelitian ini adalah penelitian pemula dalam rangka mengidentivikasi secara umum tentang kearifan lokal, sehingga nantinya diharapkan dapat dilanjutkan dalam penelitian yang lebih spisifik dari beberapa jenis kearifan local yang ada di Bali baik lokasinya maupun fokus kajiannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengungkap nilai dan norma yang ada dalam kearifan lokal, sehingga diharapkan dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama Hindu khususnya di Bali. Adapun secara lebih rinci dan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama di Bali.
2. Untuk mengetahui bentuk kearifan lokal apa saja yang ada dalam mengatur kehidupan beragama di Bali.

3. Untuk mengetahui fungsi revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini dapat merangsang kepada para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang sejenis, mengingat penelitian yang mengambil permasalahan semacam ini belum banyak dilakukan. Dengan lebih banyak dilakukan penelitian semacam ini, sehingga masyarakat beragama lebih banyak mengetahui berbagai kearifan lokal yang ada dalam upaya menghadapi permasalahan terkait dengan kehidupan beragama Hindu di Bali.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana untuk memberikan deskripsi berkaitan dengan revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama khususnya umat Hindu di Bali.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai kearifan lokal yang begitu banyak tersebar di masyarakat khususnya di Bali.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya umat Hindu tentang pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan beragama.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam upaya mencegah konflik internal maupun eksternal dalam kehidupan beragama di Bali.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan landasan dalam penelitian selanjutnya maupun bagi peneliti lain dalam fokus lebih khusus yang terkait dengan kearifan lokal yang ada di Bali..

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian haruslah ada suatu pembatasan penelitian yang fungsinga untuk menetapkan limitasi wilayah kajian, sehingga lebih terarah, terfokus dan mendalam mengenai kejian pokok permasalahan.

Penelitian yang subyeknya cukup luas akan lebih baik daripada pengambilan subyek yang terlalu sempit, tetapi karena keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti, maka penelitian ini perlu pembatasan. Adapun ruanglingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Obyek penelitian ini adalah revitalisasi kearifan lokal dan kehidupan beragama Hindu di Bali
2. Subyek dalam, penelitian ini adalah beberapa informan yang memahami kearifan lokal dan sumber-sumber tertulis yang ada kaitannya dengan nilai dan norma.

3. Tempat penelitian adalah di Bali, baik di perpustakaan maupun di desa-desa yang masih memiliki kearifan lokal dengan menggunakan informan di Bali Utara dan Bali Selatan (Buleleng dan Denpasar).

BAB II

LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penggunaan suatu teori diharapkan sebagai perspektif atau pangkal tolak dan sudut pandang untuk memahami atau menyelami alam pikiran subyek penelitian. Teori dipakai untuk menafsirkan dan memahami setiap konsep. Teori bertindak sebagai alat dalam ilmu pengetahuan serta mencoba menjawab pertanyaan mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*). Teori dapat memberikan landasan penjelasan dan prediksi. Teori dalam penelitian ilmiah bertujuan hanya satu yaitu menjelaskan hubungan diantara aktivitas-aktivitas yang teramati (Lin, 1976:15)

Terkait dengan uraian di atas dan melihat permasalahan yang ada serta untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka sejumlah teori digunakan untuk menelaah objek penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

2.1.1 Teori Fenomenologi

Fenomen berarti “ sebagai yang dimaksud atau diturunkannya sendiri”. Dengan demikian teori fenomenologis adalah kajian terhadap sesuatu menurut yang dimaksud sendiri oleh objek yang dikaji. Suatu masyarakat yang menjadi objek penelitian dengan pendekatan fenomenologis berarti berusaha memahami maksud

simbol, kepercayaan, atau ritual menurut yang mereka pahami sendiri. Tentu saja pemahaman masing-masing masyarakat terhadap kebudayaan mereka sendiri akan bermacam ragam karena masyarakat dan budaya juga bermacam ragam. Apa yang dimaksud dengan hakekat yang dipelajari menurut pemilik sendiri juga berbeda di antara pendukung pendekatan fenomenologis.(Agus,2005:171).

Teori fenomenologi mula-mula dirintis oleh Husserl (1939-1959) dengan semboyan *zuruck zu den sachen selbst*, kembali kepada hal-hal itu sendiri (Dister,1982: 23). Maksud Husserl memberikat istilah seperti itu adalah , bahwa bila ingin mengetahui apa sebenarnya sesuatu hal, misalnya ruang, gerak, dan waktu, maka janganlah puas dengan mempelajari pendapat orang tentang hal itu. Salah satu struktur apriori yang irasional ialah keinsyafan beragama (*sensus religiosus*) yaitu kepekaan terhadap yang kudus. Keinsyafan religius itu termasuk perlengkapan jiwa dibidang irasional seperti kategori-kategori akal budi termasuk perlengkapan dibidang rasional . Seperti bidang estetika, manusia melihat yang bagus dan indah itu secara intuitif dan efektif dalam bermacam-macam rupa duniawi yang simbolis, begitu pula dibidang religiusitas manusia melihat secara intuitif dan efektif misteri Tuhan dalam simbol-simbol duniawi (Dister, 1998:25).

Teori ini sangat cocok untuk mengkaji masalah penelitian yang pertama yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap kearifan local dalam kehidupan beragama Hindu di Bali.

2.1.2 Teori Semiotik

Peran teori semiotik adalah untuk mengungkapkan nilai dan norma kearifan lokal sebagai tanda juga sangat bermanfaat. Ada berbagai teori semiotik yang dapat diterapkan untuk mengkaji kearifan lokal, baik teori semiotik yang berasal aliran Charles Sanders Peirce (tradisi Amerika) maupun teori semiologi yang berasal dari aliran Ferdinand de Saussure (tradisi Eropa). Kedua tradisi itu sejak awal mengemukakan adanya rekonstruksi dan dekonstruksi tanda. Hidup manusia penuh dengan tanda termasuk hidup komunitas yang ada dalam kearifan lokal. Ada satu yang menyatukan pikiran semiologi Saussure dan semiotic Peirce, yakni sama-sama mencari makna dari konsep revitalisasi yang mewakili realitas.

Atas dasar aliran tersebut, kajian semiotik (semiologi) dapat dibedakan atas dua jenis, yakni semiotik komunikasi dan semiotik signifikasi. Semiotik komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan adanya enam faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, pesan, konteks, saluran komunikasi atau kontak, dan kode. Semiotik signifikasi tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi, sebaliknya yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. Berdasarkan kedua jenis semiotik di atas, maka dalam membedah masalah penelitian khususnya rumusan kedua yaitu tentang bentuk kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat Hindu di Bali digunakan teori semiotik komunikasi.

2.1.3 Teori Interaksionisme Simbolik

Bogdan dan Taylor dalam Suprayoga (2001:105-106), menganggap interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*) sebagai pendekatan utama (bagian penting) dari fenomenologi. Bagi Blumer dalam *Symbolic Interactionism: Perspective of Method*, bahwa interalsionisme simbolik bertumpu pada tiga premis: “(1) manusia bertindak terhadap suatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (3) makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung”. Blumer dalam Triguna (2000:43).

Tindakan manusia itu tidak disebabkan oleh beberapa kekuatan luar (seperti dinyatakan oleh kaum fungsional struktural) tidak juga disebabkan oleh kekuatan dalam (seperti dinyatakan oleh kaum reduksionis-psikologis), tetapi mereka membentuk dan merancang obyek itu, memberi arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, serta mengambil tindakan berdasarkan penilaian itu. Cara seperti ini menurut Blumer tidak terlepas dari pandangannya tentang *mind, self, and society*, yaitu diskusi mengenai cirri-ciri terpenting yang memisahkan manusia dari binatang. Manusia tidak saja mengenal tanda-tanda alamiah (*natural signs*), tetapi juga memahami simbol-simbol yang mengandung makna (*significant symbols*). Simbol yang disebutkan terakhir memberikan manusia kemampuan merenungkan (*pause*) reaksinya untuk mengulangi secara imajinatif. Simbol memberi kesempatan kepada manusia berdiri dibelakang benda yang dihadapi dan melakukan eksperimen pemikiran terhadapnya. Tindakan manusia memanfaatkan bahasa untuk melihat,

mempeertimbangkan, dan memilih merupakan proses penafsiran seperti dimaksud dalam asumsi ke tiga Blumer yang disebut dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol, Blumer dalam Triguna (2000: 4).

Dengan demikian semakin berhasil seseorang individu dan kelompok dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (indikator konsep kelas menurut Weber), semakin diperlukan simbol tradisional sebagai penguat serta pengukuh tingkat prestasi yang lebih dicapai. Karena simbol memiliki makna mendalam dan acapkali bersifat religius yang relative terbatas ruang lingkupnya, keinginan menggunakan simbol tradisional sebagai unsur melegalisasikan kedudukan yang dicapai menyebabkan terjadinya proses restrukturisasi, yaitu proses penafsiran kembali simbolisme sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat pendukungnya pada saat itu. Pemaknaan simbolisme masyarakat Hindu di Bali dalam arti terbatas pada simbol masyarakat Bali dataran yang sangat intensif menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, terutama terlihat dengan eksistensi wangsa atau kelas tradisional.

Memperhatikan uraian di atas, maka teori ini sangat tepat untuk membedah rumusan masalah ke tiga terkait dengan fungsi revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat Hindu di Bali.

2.2 Kerangka Berpikir

Quaritch Wales dalam Rahyono (2009:7) merumuskan *local genius* sebagai “*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of people*

have in common as a result of their experiences in early life". Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam definisi tersebut adalah (1) cirri-ciri budaya, (2) sekelompok manusia sebagai pemilik budaya, serta (3) pengalaman hidup yang menghasilkan cirri-ciri budaya tersebut. Pokok-pokok pikiran tersebut menunjukkan bahwa *local genius* merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya serta terwujud dalam cirri-ciri budaya yang dimilikinya. Dengan kata lain seorang anggota masyarakat budaya menjadi cerdas berkat pengalaman hidup yang dihayatinya. Ia memiliki kecerdasan karena proses belajar yang dilakukannya dalam perjalanan pengalaman hidup. Jika berangkat dari tinjauan budaya yang dihasilkan, maka yang ditemukan adalah kecerdasan yang dimiliki oleh masyarakat budaya yang bersangkutan dalam menghasilkan karya budayanya berdasarkan pengalaman hidup yang dilaluinya.

Mengacu kembali kepada definisi kearifan, yang juga berarti kecerdasan, kearifan dalam budaya juga merupakan bentuk kecerdasan yang dihasilkan oleh masyarakat pemilik kebudayaan bersangkutan. Sebuah kearifan lokal merupakan kecerdasan yang dihasilkan berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri sehingga menjadi milik bersama.

Menurut Poespowardojo dalam Rahyono (2009:9), kepribadian suatu masyarakat ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan *local genius* dalam menghadapi kekuatan dari luar. Jika *local genius* hilang atau musnah, kepribadian bangsapun memudar. Faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran dan pemelajaran kearifan lokal memiliki posisi yang strategis adalah sebagai berikut.

1. Kearifan lokal merupakan pembentuk identitas yang inheren sejak lahir.
2. Kearifan lokal bukan sebuah keasingan bagi pemiliknya.
3. Keterlibatan emosional masyarakat dalam penghayatan kearifan lokal kuat.
4. Pemelajaran kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan.
5. Kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri.
6. Kearifan lokal mampu meningkatkan martabat bangsa dan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir terkait dengan revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat Hindu di Bali, maka upaya membangkitkan kembali nilai-nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama khususnya bagi umat Hindu di Bali.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bali dengan mengambil lokasi Bali Utara Buleleng dan Bali Selatan Denpasar. Pengambilan lokasi ini dilakukan secara purposif (sampel bertujuan), artinya Bali merupakan daerah yang banyak memiliki kearifan lokal yang perlu secara terus menerus diteliti untuk dapat digunakan dalam membangun dan mengembangkan budaya Bali. Penelitian ini adalah penelitian pemula yang nantinya dapat dilanjutkan dalam penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga akan lebih lengkap permasalahan yang akan dikaji.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa ungkapan pernyataan atau narasi yang merupakan hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan revitalisasi kearifan lokal dalam kehidupan beragama bagi umat Hindu di Bali, sedangkan data kuantitatif berbentuk satuan angka, digunakan sebagai pendukung pernyataan atau narasi.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan didukung pula sumber sekunder. Penggunaan sumber tersebut mengacu pada pendapat Marzuki

(1987:55-56), yang mengemukakan bahwa data yang digali langsung dari lokasi penelitian dan berkaitan erat dengan masalah penelitian, disebut data primer. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, data primer bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang memahami kearifan lokal yang ada di Bali. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti sumber pustaka, dokumen yang terkait dengan kearifan lokal seperti dongeng, lagu, syair, dan pertanda alam yang ada di tempat penelitian.

3.3 Instrumen Penelitian

Mencari informasi dan data sesuai dengan tujuan penelitian ini, digunakan instrument penelitian. Menurut Wallace (1990:57) untuk penelitian ilmu sosial, instrument yang biasa dipakai dapat dikelompokkan menjadi dua, (1) organ indrawi manusia yang tidak dilengkapi dengan teknologi selain keahlian, (2) organ indrawi manusia yang dilengkapi dengan teknologi seperti fotografi, pita perekam, dan lain-lain.

Hubungannya dengan penelitian ini, instrument utama (key instrumen) adalah penelitiannya sendiri. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang dilakukan. Walaupun demikian, agar dapat melaksanakan observasi dan wawancara mendalam secara efektif dan terstruktur juga digunakan beberapa instrument tambahan berupa penuntun observasi (*observasi guide*), seperti *check list*, dan alat-alat teknologi lainnya seperti, alat perekam suara dan alat perekam gambar. Instrument lain yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*),

yang berisi daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, agar diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Semua itu dimaksudkan agar penanya (*interviewer*) memperoleh keterangan atau penjelasan dari pemberi informasi (*information supplyer*), secara lebih lengkap dan sistematis.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Menentukan informan adalah sesuatu yang sangat penting sebab digunakan untuk menentukan subjek yang kiranya dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan informan pangkal, setelah itu dikembangkan secara snowballing dengan menanyakan kepada informan pangkal tersebut tentang informan yang menguasai objek yang diteliti. Jika datanya belum lengkap, informan kunci ini diminta untuk menunjuk informan lain yang dianggap tahu tentang masalah yang dikaji. Sampai pada akhirnya peneliti menganggap data yang diperoleh mencukupi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yaitu: observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi seperti dikemukakan (Spradley, 1977:64-65) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi. Diantara dua jenis observasi yang ada, penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi (*non*

participant observation). Dipilihnya jenis observasi ini, disebabkan karena yang diobservasi dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat yang memahami kearifan lokal yang ada di Bali baik yang ada di Bali Utara maupun di Bali Selatan.

3.5.2 Wawancara Mendalam

Pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam melakukan wawancara, telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk penuntun wawancara (*interview guide*). Berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam wawancara tersebut, kemudian dikembangkan pertanyaan-pertanyaan lain, untuk menggali lebih banyak informasi, guna lebih menjamin validitas (kesahihan) dan akurasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti merupakan “instrument kunci” (*key instrument*) dalam penelitian. Subjektivitas penelitian sendiri dikontrol dengan cara membandingkan informasi yang didapat dari informan lain. Semua data yang dikumpulkan lewat wawancara mendalam ditulis dalam catatan lapangan (*field notes*). Wawancara mendalam dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai kearifan lokal yang berisi pesan-pesan kebijaksanaan Bali klasik seperti dongeng, lagu, syair, dan pertanda alam.

3.5.3 Studi Pustaka dan Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan dokumentasi, yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa pustaka yang relevan dan dokumen atau catatan yang telah ada pada masa lalu dan sekarang, yang secara

langsung maupun tidak langsung terkait dengan kearifan lokal yang menjadi objek penelitian. Kemudian mengumpulkan pustaka dan dokumen yang terkait dengan kearifan lokal tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan, sesuai dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan pada dasarnya hanya berlaku terbatas pada situasi dan obyek yang diteliti. Walaupun dapat digeneralisasikan, hal itu haruslah dilakukan secara selektif, terbatas pada sejarah interaksi.

3.7 Teknik Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Artinya, data dan informasi yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan sesuai kaidah ilmiah untuk yang selanjutnya dikaji dengan teori dan metode yang relevan. Penyajian hasil dalam bentuk data deskriptif dari hasil wawancara, sumber-sumber tertulis serta data pendukung lainnya yang bermanfaat dengan mendiskusikan serta memberikan penafsiran dan interpretasi. Hasil dari penyajian analisis data kemudian diambil simpulan dan verifikasi. Simpulan yang mulanya bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka simpulan itu lebih “*grounded*” verifikasi yang semula singkat dengan mencari data baru, dapat pula diperdalam untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan,

atau hal-hal yang sering timbul untuk mencapai “*inter subjective consensus*” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau “*confirmability*” dalam penelitian ini. Dalam pengambilan kesimpulan peneliti lebih memperhatikan aspek “*corroboration*” yang bertujuan bukan untuk mencocokkan apakah pengkajian kearifan local ini telah akurat atau merupakan refleksi yang benar tentang suatu keadaan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti agar yakin bahwa temuan diperoleh telah direfleksikan secara tepat sesuai kondisi di lapangan. Metode triangulasi digunakan seperti dilakukan dalam teknik dokumentasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data agar peneliti dapat mengontrol kualitas penelitian, menghilangkan dugaan bahwa penelitian ini hanya didasarkan atas satu metode atau satu sumber saja.

BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Bali

4.1.1 Kondisi Geografis

Propinsi Bali terdiri atas beberapa pulau yaitu : Pulau Bali (sebagian tersebar), Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan yang terletak disekitar kaki Pulau Bali dan Pulau Menjangan yang terletak di bagian Barat Pulau Bali. Secara geografis Pulau Bali terletak pada posisi antara 8 °C 03' 40" – 8 °50' 48" Lintang Selatan dan 114 °25' 53" – 115° 42' 40" Bujur Timur (BPS Propinsi Bali, 2010:1).

Provinsi Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang dibatasi oleh Selat Bali pada bagian Barat, sedangkan pada bagian Timur berbatasan dengan dengan Pulau Lombok. Pada bagian utara Provinsi Bali terdapat Laut Jawa dan bagian selatan terdapat Samudra Indonesia.

Daerah Pemerintahan Provinsi Bali, saat ini terbagi menjadi sembilan daerah tingkat II (Kabupaten) yang meliputi : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan,. Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibu kota Provinsi.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2011, luas wilayah Provinsi Bali meliputi perincian sebagai berikut:

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan sebesar 5.636,66 km² atau sebesar 0,29 persen luas kepulauan Indonesia. Daerah pemerintahan Provinsi Bali saat ini terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibukota provinsi. Jika dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² atau 24,23 persen dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,93%), Karangasem seluas 839,54 km² (14,89%) dan Tabanan seluas 839,33 km² (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km², dengan total luas wilayah sekitar 31,05 persen dari luas provinsi. (BPS, 2010: 5-7).

Daerah Bali memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim kemarau dan musim penghujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu daerah setempat dipengaruhi oleh ketinggian tempat rata-rata keadaan suhu di Bali sekitar 25,7° - 32,4° Celcius. Dataran rendah di bagian Selatan lebih lebar bila dibandingkan dengan dataran rendah di bagian utara. Keadaan alam seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap iklim di daerah Bali. Umumnya daerah Bali bagian selatan lebih banyak hujan bila dibandingkan daerah Bali bagian utara terutama pada bulan Desember sampai

Februari, angin bertiup dari dan Barat Laut sedangkan pada bulan Agustus angin bertiup dari Timur dan Tenggara pada bulan Maret sampai Mei angin bertiup berubah-ubah arah Rata-rata kelembaban Udara di Bali sekitar 79%. (BPS Provinsi Bali, 2010:1-2).

Relief dan topografi Pulau Bali digambarkan dengan membentanginya pegunungan di tengah-tengah yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi yaitu Gunung Batur (1.717 meter) dan Gunung Agung (3.142 meter). Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter), Gunung Patas (1.414 meter), dan Gunung Seraya (1.058 meter) serta beberapa gunung lainnya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan wilayah Bali secara geografis terbagi dalam 2 (dua) bagian yang tidak sama, yakni: (1) Bali Utara dengan daratan rendah yang sempit dan kurang landai. (2) Bali Selatan dengan daratan rendah yang luas dan landai.

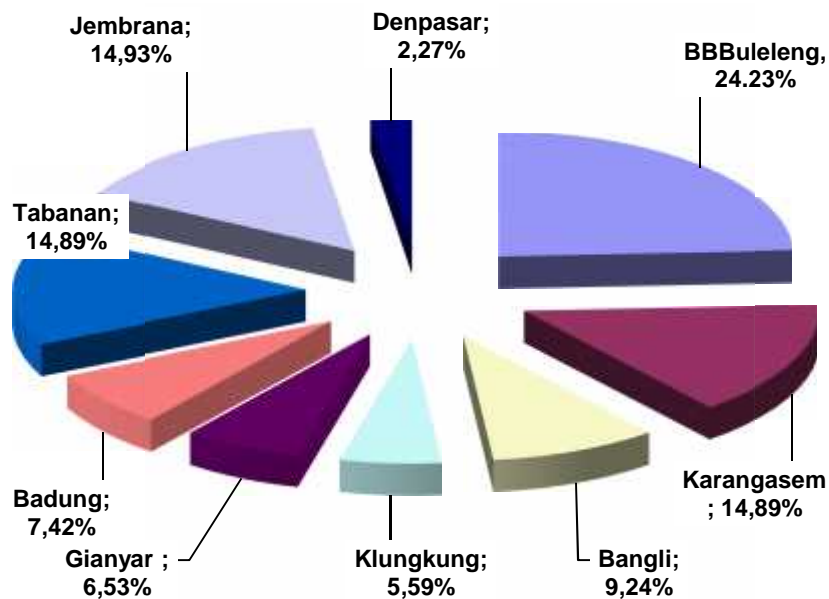
Selain itu, Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andasol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Patemon, Ringdikit, dan Pempatan, tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,9 persen dari Pulau Bali.

Jenis tanah Regusol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat di pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93 persen dari luas pulau Bali.

Jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di Jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit kuta dan Prapat Agung. Jenis tanah yang juga tidak peka terhadap erosi lainnya adalah tanah Alluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini yaitu Andosol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49 persen dari luas Pulau Bali.

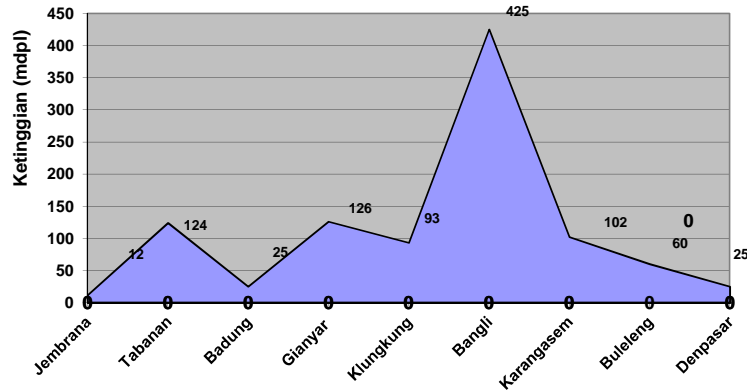
Grafik 4.1

Persentase Luas Wilayah Provinsi Bali Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2011



Grafik 4.2

Ketinggian Ibu Kota Kabupaten di Provinsi Bali



Selanjutnya dalam sumber yang sama dinyatakan bahwa relief dan topografi Provinsi Bali digambarkan dengan membentangnya pegunungan di tengah-tengah yang memanjang dari Barat ke Timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi yaitu Gunung Batur (1.717 meter) dan Gunung Agung (3.142 meter). Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain Gunung Merbuk (1.356 meter), Gunung Patas (1.414 meter) dan Gunung Seraya (1.056 meter) dan lain-lain Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi dalam dua bagian yang tidak sama, yaitu: Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau yaitu: danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Batur.

4.1.2 Penduduk Menurut Agama

Deskripsi data kependudukan menurut varian agama khususnya agama Hindu merupakan informasi penting mengenai kondisi keumatan dan kemungkinan kebutuhan terhadap sulinggih dikaitkan dengan intensitas kegiatan religi yang dilakukan oleh umat Hindu. Data mutakhir mengenai keadaan penduduk Bali pada tahun 2012 belum ada di Biro Pusat Statistik Denpasar, dengan alasan belum adanya kegiatan sensus penduduk. kondisi demikian, mengharuskan penulis untuk merujuk data lama tahun 2011. Meskipun demikian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tidak mementingkan data populasi dan sample tidak mensyaratkan penentuan populasi dan sampel yang representatif dan rigid, maka kondisi data yang ada masih dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk mendeskripsikan penduduk Bali yang berbeda secara umum. Distribusi penduduk per kabupaten dan Kota di Bali dapat disimak pada Tabel 4..1.

Tabel 4..1

Banyaknya Penduduk Menurut Kabupaten dan Agama di Bali, 2012
Population of Regency and Religion in Bali, 2012

N o	Kabupate n	Hindu	Islam	Budha	Kristen	Kathol ik	Konghu cu	Jumlah
	<i>Regency</i>	<i>Hindu</i>	<i>Mosle m</i>	<i>Buddh is</i>	<i>Kristia ni</i>	<i>Cathol ic</i>	<i>Matakin</i>	<i>Total</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Jembrana	214,643	59,30 0	857	2,660	2,850	20	280,330
2	Tabanan	394,698	19,55 1	1,362	2,073	1,406	-	419,090
3	Badung	336,468	28,71 9	1,396	12,334	12,410	-	391,327
4	Gianyar	417,495	7,231	768	750	554	-	426,798
5	Klungkung	184,095	5,254	1,108	356	192	-	191,005
6	Bangli	204,067	2,509	579	125	27	-	207,307
7	Karangasem	433,059	19,04 7	525	1,332	239	-	454,202
8	Buleleng	593,007	50,20 1	3,280	2,305	1,480	20	650,293
9	Denpasar	434,379	156,8 05	10,103	19,864	14,075	84	635,310
<i>Jumlah / Total</i>								
	2010	3,221,9 91	348,6 17	19,978	41,799	33,233	124	3,655,6 62
	2009	3,309,6 01	335,4 02	22,519	49,732	34,958	94	3,752,3 06
	2008	3,194,2	329,7	18,560	34,674	25,630		3,602,8

		07	85					56
	2007	0	329,7 85	0	0	0		329,785
	2006	3,298,6 42	319,4 19	21,590	30,322	33,110		3,702,8 13
	2005	3,296,1 55	211,5 55	21,590	50,280	25,358		3,604,9 38
	2004	3,296,1 55	285,3 96	21,590	50,280	25,358		3,678,7 79

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Bali

Source : Regional Office Of Ministry of Religion Of Bali Province

Tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi penduduk menurut agama di masing-masing kabupaten menunjukkan angka yang bervariasi dan penganut agama Hindu masih merupakan penganut agama mayoritas di Bali yakni sebesar 3,221,991 jiwa, dari jumlah keseluruhan penduduk Bali pada tahun 2011 sebesar 3,655,662 orang. penduduk Bali cukup heterogen dari segi agama yang dianut. Heterogenitas penduduk Bali dari segi agama yang dianut dapat dibuat rangking sedemikian rupa sehingga dapat diketahui tingkat heterogenitas atau polarisasi agama di masing-masing kabupaten/kota.

Jumlah penduduk dari tahun 2011-2015 akan terus mengalami peningkatan, dan berdasarkan proyeksi hasil pengumpulan data penelitian maka proyeksi jumlah penduduk Bali dapat disajikan pada tabel ssebagai berikut.

Tabel 4..2

Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Jenis Kelamin
Tahun 2011-2015
Population Projector of Bali Province by Age Group and Sex, 2011-2015

Kelompok	Tahun / Year									
	2011		2012		2013		2014		2015	
Umur	Lk/	Pr/F	Lk/	Pr/F	Lk/	Pr/F	Lk/	Pr/F	Lk/	Pr/F
<i>Age Group</i>	<i>M/</i>	<i>m/</i>	<i>M/</i>	<i>m/</i>	<i>M/</i>	<i>m/</i>	<i>M/</i>	<i>m/</i>	<i>M/</i>	<i>m/</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0 – 4	133. 2	125.7 9	132. 9	125.1 6	129. 6	123.0 5	127. 5	120.8 4	125. 4	118.6 4
5 – 9	143. 6	135.7 7	140. 7	138.8 3	138. 3	130.8 0	135. 0	128.6 8	132. 8	126.5 8
10 – 14	144. 3	137.1 1	142. 1	143.0 6	143. 6	137.4 4	145. 4	137.6 8	146. 8	138.0 8
15 – 19	133. 9	129.0 0	138. 0	141.9 2	141. 2	134.1 7	143. 7	137.2 9	144. 9	139.6 9
20 – 24	140. 3	130.9 1	139. 1	137.8 5	137. 5	129.5 2	135. 2	128.9 8	134. 8	127.5 8
25 – 29	151. 1	141.4 4	148. 4	146.8 6	146. 6	136.5 3	145. 3	135.1 0	145. 0	133.5 0
30 – 34	162.	157.6	159.	157.0	157.	150.7	155.	148.2	152.	145.1

	2		0		4		1		9	
35 – 39	168. 9	169.4	168. 3	168.2	168. 5	167.1	166. 9	164.6	164. 7	162.3
40 – 55	155. 1	155.1	160. 3	163.6	163. 1	162.4	165. 3	166.1	166. 3	168.3
45 – 49	130. 2	128.6	135. 0	139.7	139. 5	138.9	144. 4	144.7	148. 4	149.4
50 – 54	104. 6	103.7	109. 7	112.6	112. 8	112.5	117. 9	116.2	122. 5	121.1
55 – 59	82.9	81.0	85.5	89.7	89.3	88.4	92.3	92.0	96.1	96.2
60 – 64	61.5	63.5	64.6	67.7	67.5	67.9	70.5	70.8	73.4	73.9
65 – 69	44.2	48.2	46.7	48.0	48.9	52.9	51.0	53.9	53.1	55.9
70 – 74	32.4	37.8	33.1	34.8	34.0	39.9	35.0	40.9	37.1	41.8
75+	37.2	47.1	37.3	38.2	38.4	50.4	39.6	51.6	39.8	53.4

Catatan/Note : Lk/M/ = Laki-laki/Male

Pr/Fm/ = Perempuan/Female

Sumber : Badan Pusat Statistik (Berdasarkan Hasil Supas 2005)

Source : *Statistics Indonesia (Based on Result of The Internaitonal Population Survey, 2008) (BPS, 2010 : 94)*

Tabel 4.3 memberikan gambaran terperinci mengenai tingkat heterogenitas penduduk Bali dari segi agama seperti sebagai berikut.

Tabel 4.3 :**Tingkat Heterogenitas Penduduk Bali dari Segi Agama (kecuali Hindu)**

No	Kab/ Kota	Islam	Kab/ Kota	Budh a	Kab/ Kota	Protest an	Kab/ Kota	Katolik
1	Denpasar	135.86 1	Denpasar	8.572	Denpasa r	17.820	Denpasar	12.321
2	Jembran a	56.368	Buleleng	3.355	Badung	5.812	Badung	5.089
3	Buleleng	47.216	Tabanan	1.469	Jembran a	2.309	Tabanan	2.263
4	Badung	36.097	Badung	1.079	Bulelen g	1.975	Jembrana	1.730
5	Tabanan	15.041	Gianyar	700	Tabanan	1.256	Buleleng	1.345
6	Karangas m	13.747	Jembran a	681	Gianyar	734	Gianyar	557
7	Gianyar	10.138	Klung	391	Kargase m	232	Klungkun g	215
8	Klungku ng	7.739	Karagase m	254	Klungkun g	157	Kargase m	203
9	Bangli	1.646	Bangli	68	Bangli	144	Bangli	111
	Jumlah	323.85 3		16.56 9	Jumlah	30.439	Jumlah	23.834

Sumber: BPS Tahun 2010

Pada konteks lain, jumlah tempat suci (Pura) di Bali selama tahun 2010 sebanyak 4,827 Pura, meliputi Sad Kahyangan Temple, dan Kahyangan Temple, Kahyangan Tiga Temple. Berikut ini disajikan tabel tempat suci Hindu di tiap Kabupaten/Kota di Bali.

Tabel 4.4 :
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten di Bali Tahun 2011
Number of Facilities for Worship by Regency in Bali 2011

No	Kabupaten <i>Regency</i> (1)	Hindu			
		<i>Hindu</i>			
		<i>Sad Kahyangan Temple</i>	<i>Dan Kahyangan Temple</i>	<i>Kahyangan Tiga Temple</i>	<i>Jumlah Total</i>
		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jembrana	4	7	211	222
2	Tabanan	1	6	1,490	1497
3	Badung	2	11	488	501
4	Gianyar	1	46	969	1,016
5	Klungkung	1	82	346	429
6	Bangli	1	1	415	417
7	Karangasem	3	33	570	606
8	Buleleng	6	19	6	31

9	Denpasar	0	3	105	108
<i>Jumlah / Total</i>					
	2010	19	208	4,600	4,827
	2009	20	560	4,969	6,297
	2008	9	693	4,771	5,473
	2007	9	693	4,771	5,473
	2006	9	693	4,771	5,473
	2005	9	1,025	4,583	5,617
	2004	9	1,025	4,583	4,617

Sumber : Kanwil Kementerian Agama

Source : Regional Office Of Ministry of Religion Of Bali Province

Jumlah tersebut kemungkinan bertambah lagi dari tahun ke tahun, terutama tempat suci Hindu yang termasuk dalam kategori kahyangan tiga atau kahyangan desa dan pura lain dalam kategori pura umum (*public temple*), Pura Swagina/fungsional (*functional temple*), dan lain-lain. Dilihat dari kuantitas, daerah Bali memiliki ribuan tempat suci dengan berbagai klasifikasinya. Selanjutnya sesuai dengan tabel di atas jumlah total pura yang ada di Bali (belum termasuk Pura swagina, dadia, panti dan lain-lain) adalah 4,827 pura merupakan jumlah yang sangat besar, sehingga predikat Bali sebagai *The Island of thousand temples* merupakan predikat yang tepat.

Eksistensi Pura berkaitan dengan sistem religi (keyakinan agama, pengetahuan agama, praktek upacara, pengalaman agama, waktu upacara, peralatan agama, pemimpin upacara, *Pengemong(pengempon) Pura, Penyiwi Pura* dan lain-lain). Sehubungan dengan hal itu, dalam uraian berikut ini dipandang perlu untuk disajikan data tentang jumlah pemimpin upacara (Pemuka Agama) sebagai berikut .

Tabel 4.5.
Banyaknya Pemuka Agama Menurut Agama dan Kabupaten di Bali 2011
Number of Religious Leaders in Bali by Religious and Regency, 2011

No	Kabupaten <i>Regency</i> (1)	Hindu		
		<i>Hindu</i>		
		Sulinggih	Pemangku	Jumlah
		<i>Priest</i>	<i>Pemangku</i>	<i>Total</i>
		(2)	(3)	(4)
1	Jembrana	79	664	743
2	Tabanan	128	2,688	2,816
3	Badung	152	1,976	2,128
4	Gianyar	172	1,705	1,877
5	Klungkung	102	1,200	1,302
6	Bangli	53	1,449	1,502
7	Karangasem	151	2,246	2,397

8	Buleleng	86	2,804	2,890
9	Denpasar	136	1,590	1,726
<i>Jumlah / Total</i>				
	2010	1,059	16,322	17,381
	2009	1,060	15,193	16,253
	2008	963	23,670	24,779
	2007	963	23,670	24,779
	2006	963	23,670	24,779
	2005	817	18,922	19,793
	2004	817	18,891	19,708

Sumber : Kanwil Kementerian Agama

Source : Regional Office Of Ministry of Religion Of Bali Province

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sulinggih (Pandita Hindu) di Bali sebanyak 1,059 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk sarwa sadhaka (pedande, Sri Mpu, Rsi Bhujangga, dan Sira Mpu). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Bali yang menganut agama Hindu yakni sebanyak 3,221,991 jiwa, berarti proporsi atau rasio perbandingan jumlah Pandita Hindu dengan umat Hindu adalah 1:3. Namun apabila jumlah penduduk dikalikan dengan frekuensi ritual yang meliputi 5 (lima) jenis ritual (panca yadnya) maka rasio perbandingannya menjadi 1:(3x5). Jumlah ini masih dipandang memadai, mengingat tidak seluruh aktivitas ritual

membutuhkan jasa *sulinggih* dalam “*muput*” upacara. Lagi pula berdasarkan pengamatan lapangan dalam tradisi upacara/upacara keagamaan di Bali, tidak semua desa pekraman menggunakan *pandita (sulinggih)*, bahkan upacara yang besar seperti ngaben, hanya dipimpin oleh seorang pemangku saja.

4.1.3 Kondisi Sosial

Di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Bali menyadari pentingnya peningkatan sumber daya manusia sebagai pendukung utama pembangunan. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia terus menerus ditingkatkan demi tercapainya tujuan pembangunan. Pembangunan kualitas sumber daya manusia memiliki keterkaitan yang erat pada akses penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang meliputi: gedung sekolah, tenaga pengajar, buku-buku, dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan dana pembangunan guna mendukung terciptanya kegiatan belajar yang optimal sehingga diperoleh *output* yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tuntutan pembangunan. Selain itu pemerintah daerah akan senantiasa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memasuki pendidikan, mengingat sampai tahun 1997 masih terdapat anak usia 10 tahun ke atas yang sama sekali tidak atau belum pernah memasuki dunia pendidikan.

Prosentase tertinggi tercatat di Kabupaten Klungkung yaitu mencapai 28,55 persen dari seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas. Daerah lain yang angkanya cukup tinggi prosentase tidak sekolah pada usia 10 tahun ke atas adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli, masing-masing 21,64 %; 20,70 %; dan 20,64 %. Sedangkan daerah lain yang paling rendah prosentasenya adalah Kotamadya Denpasar, disusul Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung (BPS, 1997 :11).

Di bidang keagamaan, penduduk Bali sebagian besar menganut agama Hindu yakni sebesar 93,12 %, dan selebihnya agama Islam 5,36 %, Budha 0,56 %, Kristen Protestan 0,51 %, dan Kristen Katolik penganutnya sebesar 0,45 %. (Biro Statistik, 2010:5). Meskipun daerah Bali penduduknya mayoritas beragama Hindu, suasana kehidupan keagamaannya masih tetap diwarnai oleh suasana penuh kedamaian, toleransi, hidup rukun dan saling menghormati serta senantiasa bekerjasama dengan baik dalam mendukung program-program pembangunan.

Di samping pembangunan di berbagai sektor di atas, Pemerintah Daerah Bali juga senantiasa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perangkat kebijakan yang ada. Adalah sangat relevan apabila perbaikan derajat kesehatan masyarakat dibarengi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit umum dan puskesmas. Di Bali pembinaan rumah sakit umum baik milik pemerintah maupun swasta, tidak

menunjukkan rumah sakit hanya bertambah satu unit pada tahun 2010 dari 24 unit menjadi 25 unit dengan kapasitas 2.580 unit tempat tidur (BPS Provinsi Bali, 2010:64).

Peningkatan fasilitas fisik juga dibarengi dengan peningkatan ketersediaan tenaga medis (dokter dan para medis) lainnya. Jumlah tenaga medis di Bali pada tahun 2010 sebanyak 335 orang (239 dokter dan 96 dokter gigi) sementara untuk para medis lainnya 2.393 orang. Disamping peningkatan fasilitas kesehatan dan peningkatan tenaga medis, dibarengi pula dengan peningkatan penyuluhan kesehatan agar dapat memperbaiki perilaku hidup sehat masyarakat..

4.1.4 Agama dan Kebudayaan

Dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang obyek penelitian terutama dalam kaitannya dengan revitalisasi kearifan lokal di Bali khususnya mengenai kehidupan beragama, bahasan mengenai masalah agama dan kebudayaan tidak dapat dikesampingkan. Sehubungan dengan itu deskripsi yang holistik diperlukan, mengingat daerah Bali memiliki spesifikasi tersendiri dilihat dari aspek agama dan kebudayaannya bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Essensi kajian tentang revitalisasi kearifan local dalam kehidupan beragama di Bali akan

memperjelas pemahaman tentang obyek-obyek penelitian di Bali. Berikut ini akan diuraikan secara kronologis sebagai berikut:

4.1.4.1 Agama

Berdasarkan atas data statistik Bali, sebanyak 93,12% masyarakat Bali menganut agama Hindu-Bali. Walaupun demikian, ada pula suatu golongan kecil orang-orang Bali yang menganut agama Islam, Kristen dan Katolik. Penganut-penganut agama Islam terutama terdapat di daerah pinggir pantai di beberapa daerah pedalaman, di beberapa kota seperti Karangasem, Klungkung, dan Denpasar, dan Buleleng. Sedangkan penganut-penganut agama Kristen dan Katolik terutama terdapat di daerah Denpasar, Jembrana, dan Singaraja.

Agama Hindu banyak mengandung unsur-unsur lokal yang telah terjalin ke dalamnya sejak dahulu kala. Di berbagai daerah di Bali, tentu terdapat juga berbagai variasi lokal dari agama Hindu-Bali itu, walaupun dalam masa yang akan datang variasi itu akan berkurang karena adanya proses modernisasi yang dialami oleh agama Hindu-Bali itu, dan karena ada pengaturan dari atas yang dilaksanakan oleh Jawatan Agama Bagian Hindu, serta oleh majelis agama yang disebut Parisada Hindu Dharma.

Di dalam kehidupan keagamaannya, sistem keyakinan masyarakat Bali tercermin pada konsep yang disebut dengan Panca Sradha (Lima kepercayaan) yakni: percaya dengan adanya *Brahman* (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), percaya dengan adanya *Atman* (jiwa abadi), percaya dengan adanya *karma phala* (hasil perbuatan), percaya dengan adanya *punarbhawa* (kelahiran kembali), dan percaya dengan adanya Moksas (kelepasan/bersatunya kembali jiwa manusia dengan Tuhan).

Orang yang beragama Hindu percaya akan adanya satu Tuhan, dalam bentuk konsep *Trimurti*, Yang Esa, Trimurti ini mempunyai tiga wujud atau manifestasi, ialah wujud Brahma yang menciptakan, wujud Wisnu yang melindungi, memelihara, dan wujud Siwa yang melebur segala yang ada. Di samping itu orang Bali juga percaya kepada pelbagai dewa dan roh yang lebih rendah dari Trimurti dan yang mereka hormati dalam pelbagai upacara bersaji. Semua bentuk-dewa-dewa atau roh-roh suci itu hanyalah manifestasi dari Tuhan yang Esa (Ida Sanghyang Widhi Wasa). Perbedaan nama itu hanyalah menunjuk pada sifat Tuhan yang multi dimensi seperti *omnipresent* dan *omnipotent*, yang sesungguhnya satu adanya. Dalam kitab suci hal ini disebut dengan berbagai istilah yakni: *ekam sad wipra bahuda wadanti* (hanya satu Tuhan, tetapi orang bijaksana menyebut dengan banyak nama), *eko narayanad na dwityo asti kascit* (hanya satu Tuhan disebut Narayana) dan lain-lain. Agama Hindu juga menganggap penting konsepsi mengenal roh

abadi (*atman*), adanya buah dari setiap perbuatan (*karmapala*), kelahiran kembali dari jiwa (*punarbawa*) dan kebebasan jiwa dari lingkaran kelahiran kembali (*moksa*). Semua ajaran-ajaran itu termaktub dalam sekumpulan kitab-kitab suci yang bernama Weda.

Di samping itu terdapat pula buku-buku dalam bentuk *lontar* (dibuat dari daun lontar berhuruf Bali) yang mengandung banyak tuntunan mengenai pelaksanaan agama, pelbagai kumpulan mantra-mantra, keterangan mengenai mengenai pelbagai undang-undang, bentuk prosa dan puisi yang diambil dari epos Hindu Mahabarata dan Ramayana, keterangan pelbagai mistik dan sebagainya. Bahasanya terutama terdiri dari bahasa Jawa Kuno, tetapi ada pula yang dicampur dengan bahasa Sansekerta.

Tempat melakukan persembahyangan bagi orang Bali disebut dengan Pura. Pura ini memiliki bentuk, jenis dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat umum (*public temple*), artinya pura ini diperuntukkan bagi semua golongan masyarakat yang sering disebut dengan *Pura Kahyangan Jagat*, seperti Pura Besakih, Pura Melanting. Pura Batur, Pura Batukaru, Pura Ulu Watu dan lain-lain. Di samping itu ada pula pura yang dibangun di tiap-tiap desa adat yang disebut dengan *Pura Kahyangan Tiga* yang meliputi: Pura Desa, Pura Dalem, dan Pura Puseh. Pura Kahyangan tiga ini tergolong teritorial temple, karena pura ini dibangun pada masing-masing wilayah desa adat. Selain kedua kelompok pura tersebut masih ada pura yang dipuja oleh

para penganut profesi tertentu seperti *Pura Melanting* (tempat pemujaan bagi para pedagang), Pura subak (pemujaan bagi organisasi subak). Ada juga pura yang dipergunakan sebagai tempat pemujaan keluarga dan leluhurnya seperti dadia, merajan, sanggah dan lain-lain. Dengan demikian maka layaklah Bali disebut sebagai *the island of thousand temple*, karena beragamnya jenis dan sifat Pura di Bali. Masing-masing pura ini memiliki perayaan tersendiri yang penanggalannya ditentukan berdasarkan *Balinese calendar* yakni berdasarkan sistem pawukon, sasih (*lunar system*) dan solar system atau sistem penanggalan kalender masehi. Karena itu “masyarakat Bali menggunakan dua macam sistem penanggalan yaitu penanggalan Hindu-Bali dan taggalan Jawa Bali “(J.L Swellengrebel, 1960: 115-128).

Dalam sistem penanggalan di Bali, ternyata yang dipergunakan dalam menentukan penanggalan atau kalender itu adalah tahun Çaka, yang berasal dari India. Perlu dijelaskan di sini bahwa:

Tahun Çaka itu dimulai ketika Maharaja Kaniska dinobatkan pada tahun 78 Masehi di India Barat Laut. Dari sana cara perhitungan tahun itu lalu dibawa ke India Selatan oleh para Catrapa (gubernur), yang selanjutnya disebarkan ke daerah-daerah Malaya, Muara Sungai Mekong dan Indonesia oleh para misi Brahmana “(Shastri,1963:94).

Sistem penanggalan Hindu-Bali masih menggunakan penanggalan dengan tahun Çaka. Tahun Çaka terdiri dari 12 bulan yang lamanya 355 hari, tetapi juga kadang-kadang 354 atau 356 hari. Orang menghitung dengan

kedua bagian dari bulan, ialah bagian bulan terbit yang disebut tanggal dan bagian bulan gelap yang disebut panglong. Sistem perhitungan ini sesuai dengan sistem Hindu yakni perhitungan sukia paksa (paroh terang) dan kresna paksa (paroh gelap). Tiap-tiap bulan penuh (purnama) dan bulan mati (tilem) ada upacara-upacara kecil di tiap-tiap keluarga orang Bali. Kalau upacara tadi jatuh bersamaan dengan perayaan suatu tempat suci, maka diadakan upacara yang lebih besar. Sistem kalender Hindu Bali didasarkan atas purnama-tilem ini dipakai pada perayaan di pura-pura di berbagai daerah di Bali, tetapi di seluruh Bali dirayakan Tahun Baru Saka yang jatuh pada tanggal 1 dari bulan ke sepuluh (kedasa) dan perayaan itu disebut Hari Raya Nyepi. Sehari sebelum tahun lama berakhir, pada bulan ke sembilan (tilem kesanga) diadakan upacara buta yadnya. Pada hari tahun barunya orang pantang melakukan segala kegiatan (Nyepi) dan malamnya pantang menyalakan api, pantang melakukan kegiatan di luar rumah, pantang bepergian dan diikuti dengan berpuasa (melakukan brata penyepian).

Di samping menggunakan sistem Tahun Saka dalam penanggalan Hindu, juga dipergunakan sistem Wuku untuk menentukan Hari-hari besar Hindu. Wuku ini terdiri dari 30 wuku yakni: Sinta, Landep, Ukir. Kulantir, Tolu, Gumbreg, Wariga, Warigadian, Julungwangi, Sungsang, Dunggulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Pahang, Krulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matal, Uye, Menail, Perangbakat, Bala, Ugu, Wayang,

Klawu, Dukut, dan Watugunung. Masing-masing wuku usianya satu minggu (tujuh hari) dan pergantiannya setiap hari minggu. Dengan demikian satu rangkaian wuku berjumlah 210 hari. Pada wuku-wuku tertentu umat Hindu melaksanakan hari raya secara teratur.

Agama Hindu juga memiliki sistem ritual yang tercermin dalam pelaksanaan Lima kelompok upacara yadnya yang disebut dengan istilah *Panca Yadnya*. *Panca Yadnya* terdiri dari *Dewa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Manusa Yadnya*, dan *Butha Yadnya*.

Dewa yadnya berkaitan dengan penyelenggaraan upacara pemujaan kepada Tuhan beserta segala manifestasinya yang biasanya dilakukan di pura-pura umum dan keluarga. Bentuk pelaksanaan upacara ini berupa perayaan hari-hari suci keagamaan seperti *Hari Raya Galungan*, *Hari Raya Kuningan*, *Hari Raya Saraswati* dan lain-lain. *Pitra yadnya*, merupakan upacara pemujaan kepada leluhur atau roh orang yang telah meninggal. Pelaksanaan upacara ini meliputi upacara kematian sampai pada upacara ngaben. *Rsi Yadnya*, berkaitan dengan upacara pentasbihan pendeta (mediksa). *Manusa Yadnya*, berkaitan dengan pelaksanaan upacara ritual yang dilaksanakan pada saat orang berada dalam kandungan sampai dewasa (kawin). Sedangkan upacara *Butha Yadnya* merupakan upacara korban suci kepada makhluk yang dianggap lebih rendah atau roh-roh yang mengganggu demi terciptanya keseimbangan alam.

Dalam proses penyelenggaraan upacara ini terdapat beberapa komponen yang memegang peranan penting dalam sistem religi sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1992: 252-253) bahwa komponen religi terdiri dari: pemimpin ritual, peserta upacara, peralatan ritual, waktu dan tempat penyelenggaraan ritual. Komponen-komponen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin ritual pada upacara-upacara yang besar biasanya dilakukan oleh pedanda atau sulinggih yang telah memenuhi syarat untuk memimpin upacara seperti telah *mediksa* atau melalui proses penyucian dan telah *medwijati* dan *amari aran*. Sedangkan upacara kecil di tiap-tiap pura dapat dilakukan oleh Pinandita, Jero Gede atau Jero Mangku yang bertugas pada masing-masing pura.

Setiap komponen religi di atas, harus bekerja sama untuk mesukseskan suatu ritual, karena keberhasilan dalam suatu ritual amat bergantung pada unsur yang disebut *Manggala Upakara* (Pemimpin ritual), *Sang Yajamana* (Penyelenggara upacara), dan *Sang Undagi* (Tukang banten / pembuat upacara).

Dalam proses ritual tiap orang di Bali dapat minta pertolongan dari berbagai macam pelaku upacara agama tersebut di atas untuk keperluan upacara agama baik bagi dirinya maupun dalam keluarga di rumah. Dalam hal itu dapat dikatakan bahwa Ia dapat ber-*siwa* kepada seorang pendeta, misalnya kepada seorang *Pedanda Siwa* atau *Pedanda Bodha*, atau kepada

seorang Rsi dan lain sebagainya. Hubungan di antara mereka dapat dikatakan sebagai hubungan antara *Sisia-Siwa*. Dalam hal itu seseorang sering diberi air suci (*tirtha*) oleh pendeta yang bersangkutan. Tetangga atau orang lain di luar keluarga dapat juga minta air suci dari upacara-upacara yang dilakukan di rumah (Bagus, 1997:304).

Pelaksanaan yadnya dalam agama Hindu hanyalah merupakan salah satu aspek dari tiga kerangka dasar agama Hindu (Tri Kerangka Dasar agama Hindu) yang meliputi: *Tattwa* (Filsafat), *Susila* (etika) dan Ritual. Unsur *tattwa* dan etika melandasi pelaksanaan ritual atau yadnya yang sarat dengan simbol-simbol keagamaan itu. Sebagai simbol, maka eksistensinya merupakan perantara dalam proses komunikasi dengan yang abstrak (*niskala*), atau antara pemuja dengan yang dipuja. Dengan banyaknya simbol-simbol ritual dalam Hindu, maka filsafat dan pemahaman makna para *phernalia* itu makin amat penting dan perlu diketahui latar pelaksanaan yadnya itu, yang memang hanya merupakan alat, sarana (*upakara*) dan bukan merupakan tujuan.

4.1.4.2 Kebudayaan Bali

Kebudayaan Bali sejak masa lampau sampai saat ini menunjukkan diri sebagai kebudayaan yang terbuka. Hal ini tampak dari proses komunikasi Kebudayaan Bali dengan kebudayaan-kebudayaan etnik tetangga seperti Kebudayaan Jawa, Kebudayaan Bugis, Kebudayaan Sasak, dan lain-lain, yang telah berlangsung sejak dahulu dalam kerangka komunikasi antar etnik di Indonesia. Studi-studi sejarah pun mengemukakan bahwa kebudayaan Bali telah berkali-kali berkomunikasi dengan kebudayaan asing seperti Cina, India, Mesir, Jepang dan kebudayaan-kebudayaan bangsa Eropa.

Perjalanan kebudayaan Bali mengikuti rentang waktu yang cukup panjang, berawal dari masa pra sejarah, dengan tahap zaman batu (paliolitik, megalitik dan neolitik), zaman perunggu dan zaman logam, kemudian memasuki zaman sejarah dengan melewati tahap-tahap pengaruh dari kebudayaan modern. “Hampir semua gelombang pengaruh kebudayaan luar pernah mewarnai sejarah kebudayaan Bali. Tetapi yang paling berpengaruh adalah kontak dengan Kebudayaan Hindu (Mantra, 1993 :11). Komunikasi yang dimulai sekitar permulaan tarik masehi tersebut berhasil mewujudkan satu bentuk perpaduan yang utuh antara tradisi, agama, kebudayaan, dengan kualitas nilai-nilai religi, estetika dan solidaritas. Pola kebudayaan itulah yang menjadi dasar bagi terbentuknya identitas manusia dan masyarakat Bali.

Di sisi lain bisa ditarik beberapa prinsip yang ajeg dari proses komunikasi kebudayaan Bali dengan berbagai kebudayaan asing, di antaranya kebudayaan Bali menunjukkan sifat fleksibel dan adaptif. Dalam perkembangannya kebudayaan Bali senantiasa dapat menerima, mengolah dan mengembangkannya sesuai dengan kultur lokal tanpa melenyapkan kepribadian sendiri. Bahkan juga cukup penting, bahwa kontak kebudayaan itu dapat membentuk ketahanan budaya dan *local genius* dan kebudayaan Bali. Hal ini tampak pada berbagai pengaruh kultur Hindu India dan pembentukan struktur wangsa yang dipengaruhi sistem kasta India, walaupun prakteknya tidak persis sama dengan sistem kasta di India. Demikian pula dengan masalah seni atau ragam hias tradisional Bali yang banyak dipengaruhi oleh kultur Cina, Mesir dan Belanda yang diolah dan diadaptasikan sesuai kultur lokal (Mantra, 1993:11-14).

Bila dianalisis secara struktural baik struktur intern maupun struktural ekstern banyak beberapa ciri yang melekat pada kebudayaan Bali yang selalu menunjukkan ciri sebagai kebudayaan yang cenderung ekspresif dan berkembang secara variatif. Hal itu akibat struktur yang menjadi esensi dan pembentuk kebudayaan ini merupakan perpaduan yang utuh antara tradisi dan agama Hindu yang berintikan nilai religi, estetika dan solidaritas. Nilai-nilai itu merupakan suatu gambaran bahwa kalau kebudayaan Bali lebih merefleksikan diri sebagai kebudayaan yang ekspresif. Sedangkan dari sudut

luar, yang tentunya juga dibentuk dan dijiwai oleh struktur dalam, sepanjang perjalanan sejarahnya, Bali senantiasa diwarnai oleh proses adaptasi dan respon yang dinamis dari masyarakat Bali terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungannya.

Dengan demikian struktur luar kebudayaan Bali memperlihatkan keragaman bentuk dan variasi sesuai dengan *adagium desa, kale, patra* (waktu, tempat dan keadaan). Dibandingkan dengan struktur dalam, struktur luar Bali lebih cepat berubah. Namun demikian pola perkembangan kebudayaan Bali tidak akan menyimpang dari beberapa konsep yang membangun dan melandasi strukturnya. Konsep-konsep itu antara lain: keselarasan, solidaritas, *karmaphala*, *desa, kala, patra* dan *guna* (Mantra, 1993:12-14; Pudja, 1985:203-204).

Manusia Bali dalam pola prilakunya dilandasi oleh cara pandang agama yang disebut dengan istilah *dharma siddhi yatra* yaitu ajaran tentang kesempurnaan dalam mencapai tujuan hidup yang harus dilandasi oleh dharma. Ajaran ini dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan suatu misi organisasi dan dalam mengorganisir kegiatan untuk mencapai tujuan hidup.

Keberadaan kebudayaan Bali juga ditentukan oleh dukungan sistem yang mapan. Sistem sosial itu berwujud lembaga-lembaga tradisional, seperti

desa adat, dadia dan organisasi Subak yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga tradisional yang dibentuk melalui konsep *tri hita karana* (parhyangan pawongan dan palemahan) sangat fungsional sebagai basis dalam menerapkan dan mengembangkan kebudayaan Bali. *Tri Hita karana* yang mengandung filsafat keselarasan, yaitu keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Filsafat keselarasan itu mendorong masyarakat untuk senantiasa hidup harmonis dan dapat berdampingan dengan semua golongan sehingga merupakan sesuatu yang kondusif dalam merealisasikan doktrin *dharmartha* (tujuan agama Hindu) yakni *Moksa artham jaghadhita ya ca iti dharmartha* (tercapainya kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani secara selaras dan seimbang).

Masyarakat dan kebudayaan Bali secara keseluruhan menggambarkan tradisi kecil, tradisi besar (Hindu) dan tradisi modern (Swellengrebel, 1960: 29-31; Mc Kean, 1973:21-24). Dari tiga kategori tradisi ini, dengan berpijak pada eksistensi dan intensitas sebagai kriterium, maka tradisi besar agaknya mendominasi sistem budaya dan sistem sosial masyarakat Bali dibandingkan dengan dua tradisi yang lainnya. Paralel dengan kategori yang berdimensi vertikal seperti tersebut di atas, masyarakat dan kebudayaan Bali secara horizontal telah berkembang melalui tiga tingkatan integrasi: integrasi komunitas, integrasi regional, dan integrasi nasional-international, selain

pemahaman yang bersifat diakronis ini, secara sinkronis masyarakat dan kebudayaan dalam adagium desa, *kala* dan *patra*. Di antara berbagai sub kultur yang ada, sub kultur kebudayaan sebagai wujud adaptasi ekologi tampaknya cukup dominan.

Bertolak dari patokan di atas, maka sistem nilai budaya Bali diasumsikan sebagai sebuah bagan yang secara teoretik dan struktural mengklasifikasikan di satu pihak sistem nilai yang menduduki posisi sentral (nilai tradisi besar Hindu dan nilai budaya petani) dan di pihak lain sistem nilai yang menduduki posisi periperal seperti nilai tradisi kecil, nilai tradisi modern, nilai nasional, dan nilai dari berbagai subkultur. Sistem nilai pada posisi sentral memberikan pengaruh dan karakter yang lebih kuat terhadap unsur-unsur kebudayaan Bali. (Geriya, 1984:42).

Selanjutnya menurut Geria (1984:43) pengkajian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap kebudayaan petani di Bali, disimpulkan bahwa nilai atas kerja, nilai yang berpijak pada *karma phala*, nilai keselarasan, nilai gotong royong adalah seperangkat nilai yang sangat dominan dalam sistem nilai budaya Bali yang beragama Hindu. Jenis nilai seperti ini sangat relevan untuk memantapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengangkatan nilai budaya ini dari kebudayaan daerah tentu sangat penting artinya untuk memperkaya dan memantapkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

4.1.5 Sistem Sosial

Dalam fungsionalisme struktural sering digunakan konsep sistem ketika membahas mengenai struktur masyarakat atau lembaga sosial. Sistem merupakan organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling terkait atau saling tergantung. Ilustrasinya adalah sistem sosial yang merupakan bahasan bagi para sosiolog. “Sistem sosial adalah struktur atau bagian-bagian yang saling berhubungan, posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan” (Poloma, 1994:28). Misalnya, status suami, istri dan anak-anak yang saling berhubungan disebabkan oleh penghargaan atau penampilan oleh setiap peranan-peranan tersebut sehingga membentuk lembaga keluarga. Struktur lembaga-lembaga tersebut saling berhubungan sehingga membentuk sistem sosial yang lebih besar seperti masyarakat atau negara.

Untuk memperoleh deskripsi yang lebih mendalam tentang masyarakat Bali, dipandang perlu untuk diuraikan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan sistem sosial Bali seperti sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, dan lain-lain yang tentunya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Bali. Beberapa aspek sistem sosial yang perlu diuraikan guna memperjelas deskripsi tentang masyarakat Bali sebagai obyek penelitian adalah sebagai berikut:

4.1.6 Sistem Kemasyarakatan

Suatu sistem dan organisasi kemasyarakatan adalah satu unsur universal dari pada kebudayaan. Sistem ini di dalam organisasi kemasyarakatan di Bali terefleksi dalam bentuk desa adat, banjar, subak, seka dan pengelompokan sosial lainnya. (MPLA. 1989/1990:1). Analog dengan pendapat tersebut penulis akan menguraikan aspek-aspek dalam sistem kemasyarakatan tersebut sebagai berikut:

4.1.6.1 Desa Adat (*Desa Pekraman*)

Sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia, bahwa Bali memiliki dualisme sistem pemerintahan desa yakni desa dinas dan desa adat. Sekalipun demikian, eksistensi kedua lembaga ini tidak menghambat kinerja pembangunan di pedesaan, dan bahkan keduanya dapat saling menunjang dalam proses pembangunan. Desa dinas sebagai kesatuan wilayah administrasi terkecil dalam suatu susunan wilayah pemerintahan negara Republik Indonesia, yang dalam tugasnya sudah tentu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diembankan berdasarkan atas kewenangan formal pemerintah. Sedangkan desa adat merupakan kesatuan wilayah berdasarkan atas kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup yang

diwarisi secara turun-temurun, dan mengemban tugas adat dan agama. Kedua institusi ini dapat dibedakan secara tegas dari segi fungsi dan peranannya dalam pembangunan pedesaan di Bali.

Secara historis, desa adat berkembang lebih awal dari pada desa dinas, menurut Geriya (1991:10) “desa adat di Bali telah ada sejak zaman pra Hindu, yaitu pada zaman Bali Agama. Ketika itu tuha-tuha sebagai pemimpin sebah *wanua* sudah dianggap sebagai kepala adat”. Lebih lanjut Geriya (1991:11) menyatakan bahwa: “Masuknya Hindu memantapkan kehidupan desa adat yang kemudian membuahakan tradisi besar, serta membangun konfigurasi dasar kebudayaan Bali sebagai pola kebudayaan ekspretif”.

Masyarakat Bali yang terintegrasi dalam suatu sistem organisasi yang disebut dengan istilah desa adat, tunduk pada berbagai norma dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau *Prajuru* desa adat. Selanjutnya mengenai definisi desa adat, dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 6 Tahun 1986, dinyatakan sebagai berikut:

“Desa Adat sebagai desa dresta meruakan kesatuan masyarakat hukum adat Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa unsur yang merupakan pembentukan desa adat yakni: 1). Adanya unsur wilayah atau *palemahan* desa

berbagai konkritasi dari *bhuana agung* yang tunduk pada hukum teritorial *Bale Agung*, 2) Adanya *Kahyangan Tiga* sebagai konkritasi tempat pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa), 3) Adanya kesatuan tradisi dan pergaulan hidup yang berdasarkan ajaran agama Hindu, dan 4) Adanya sifat desa adat yaitu otonomi desa adat yang bermakna berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri di desa adat merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh *krama desa adat* (warga desa adat).

Otonomi desa adat itu sendiri berasal dari masyarakat desa yang semula urusan-urusan batin penduduk desa. Hak otonomi desa adat sesungguhnya sudah ada sejak kelahirannya, seperti misalnya memungut urunan untuk kepentingan upacara agama, peran sebagai hakim perdamaian desa untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan di antara penduduk desa adat yang bersangkutan atau tentang segala sesuatu mengenai adat kebiasaan dan perikehidupan sehari-hari dalam lingkungan adat yang termasuk mengurus kekayaan desa adat dan lain sebagainya. Dengan demikian “isi dari otonomi desa adat meliputi: bidang organisasi, keuangan, sosial, budaya, keamanan dan lain-lain”. (Santosa, 1989:16).

Kekuatan desa adat di Bali secara teoretis dapat ditinjau dari beberapa segi yakni; secara filosofis dan sosiologis. Secara filosofis dapat dilihat dari segi filosofis yang melandasi terbentuknya desa adat yakni adanya unsur

falsafah *Tri Murti* yang tampak pada pemujaan di Pura Kahyangan Tiga. Dan adanya unsur *Tri Hita Karana* yakni unsur palemahan (wilayah), unsur Pawongan (Masyarakat adat) dan unsur Parhyangan (tempat Pemujaan) yang melandasi terbentuknya struktur desa adat di Bali. Sedangkan secara sosiologis, kuatnya kehidupan desa adat tercermin pada beberapa faktor yang menyebabkannya seperti adanya perasaan cinta dan terikat kepada wilayahnya, adanya kepribadian bersama, adanya hubungan yang bersifat intim dan cenderung bersifat serba rela, dan adanya suatu tingkat penghayatan dan sebagian besar lapangan kehidupannya secara bulat. Hal ini tentunya merupakan konkritasi dari adanya suatu kesatuan tradisi dan tata krama dalam pergaulan hidup masyarakat Hindu di Bali.

Terwujudnya desa adat yang kokoh pada hakekatnya disebabkan karena desa adat merupakan suatu kesatuan wilayah tempat tinggal untuk kehidupan atas dasar kepentingan bersama dalam masyarakat dan juga persekutuan dalam persamaan keyakinan terhadap Ida Sang Hyang Widhi dan berbagai manifestasinya.

Selain itu kokohnya eksistensi desa adat, karena struktur desa adat dibangun atas dasar konsepsi yang sama yaitu konsep *Tri Hita Karana*, yang dimantapkan pula oleh prinsip-prinsip yang menjadi landasan dan identitas desa adat itu sendiri seperti: (1) Prinsip memberi keseimbangan antar peran sebagai subyek dan obyek, (2) Prinsip gotong royong dan kekeluargaan, (3)

Prinsip diversifikasi menurut adagium desa (tempat/daerah), kala (waktu), dan patra (keadaan), (4) prinsip musyawarah untuk mufakat, dan (5) prinsip kemandirian.

Dalam setiap desa adat terdapat unsur *Pawongan* (masyarakat) yang merupakan pendukung dan eksistensi desa adat yang disebut dengan istilah krama desa adat. Keanggotaannya sebagai desa adat dengan berbagai persyaratannya, hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig desa adat masing-masing. Persyaratan sebagai anggota desa adat (krama desa adat) sangat bervariasi dan didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat. Namun demikian “ukuran-ukuran umum yang dipakai untuk menetapkan seseorang untuk menjadi krama desa adat adalah menempati suatu wilayah desa yang bersangkutan, telah kawin dan beragama Hindu” (Beni, 1989/1990:15) Sedangkan Sunendra (1990:4), menambahkan persyaratan untuk menjadi anggota desa adat (krama desa adat) adalah: “1) Adanya unsur domisili, dan 2) Adanya stelsel aktif yaitu adanya permintaan atau permohonan dari seseorang untuk menjadi krama desa adat”. Dengan demikian bisa terjadi bahwa krama desa adat tersebut berada di luar wilayah desa adat yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan atas persyaratan-persyaratan tersebut, maka dapat menimbulkan pengelompokan desa adat yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan: (1) Menempati atau tidak menempati karang desa, (2). Utuh atau

tidak utuhnya perkawinan, (3). Cacat atau tidak cacatnya fisik seseorang, dan (4). Anak kandung yang telah kawin. Pengelompokkan desa adat seperti itu akan membawa konsekuensi terhadap tugas dan kewajiban sebagai krama desa adat.

Disamping memiliki kewajiban yang mesti dilaksanakan, krama desa adat dapat menggunakan haknya dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Hak dalam organisasi meliputi: (1). Hak untuk memilih kepala desa adat, (2) Ikut serta dalam sangkepan desa adat (rapat desa adat), (3). Ikut serta dalam pemerintahan desa adat bersama prajuru desa adat lainnya, dan (4). berhak dipilih sebagai Prajuru Desa Adat (Purwita, 1984:19).
- b. Hak dalam menyelenggarakan upacara meliputi:(1) berhak untuk mendapatkan saksi dalam rangka meresmikan upacara yang mereka adakan, (2).berhak *nuur* pendeta untuk mengantarkan yadnya yang mereka selenggarakan, sebab pendeta itu adalah milik desa adat, (3). Berhak memakai kuburan milik desa adat apabila krama desa adat ditimpa kematian (Parisada Hindu Dharma, 1980:11).

Hak dan kewajiban tersebut di atas melekat pada setiap anggota krama yang keanggotaannya dianggap sah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam awig-awig desa adat setempat. Kewajiban dan hak yang diperoleh oleh krama desa adat dalam tiap-tiap desa adat cukup bervariasi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam awig-awig desa adat dan nilai-nilai yang tinggi oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketentuan yang tertera dalam desa adat tidak hanya mengatur berbagai aktivitas sosial krama desa adat, tetapi juga mengatur aspek religius masyarakatnya. Hal ini selaras dengan fungsi desa adat yakni untuk “memelihara, menegakkan, dan

memupuk adat istiadat yang berlaku di desa adat yang bersangkutan, dan yang diterima secara turun-temurun dari para leluhur mereka” (Surpha, 1986:84).

Peranan desa adat menurut Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) adalah: peranan dalam pemerintahan desa adat, sebagai hakim perdamaian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan kebudayaan daerah (MPLA, 1989/1990:35-39). Yang dimaksud dengan pemerintah desa adat adalah kekuasaan penyelenggaraan dan peraturan rumah tangga desa berdasarkan otonomi aslinya. Sedangkan pemerintah desa yang dimaksud adalah pemerintah dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 mencakup kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat yaitu Pemerintah Desa dan Kelurahan. Strukturnya juga meliputi desa adat dan desa dinas. Hubungan pemerintahan desa adat dengan desa (dinas) menurut MPLA saling tunjang menunjang secara paralel dalam wujud kerjasama dalam pengambilan keputusan menyangkut pemekaran desa, penyampaian aspirasi waga adat, kerjasama / gotong royong menyangkut tenaga dan dana untuk tujuan-tujuan pembangunan desa dan lain-lain.

Sedangkan peran menyangkut Hakim Perdamaian Desa, adalah peran desa adat sebagai hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan desa atau

hakim yang menyelesaikan sengketa-sengketa di desa adat secara perdamaian melalui paras-paros menuntut hukum adat yang berlaku. Personalia Hakim Perdamaian Desa meliputi Bendesa Adat dibantu oleh Lurah atau Perbekel serta prajuru-prajuru lain yang pelaksanaan tugasnya dilakukan dalam sangkepan Warga adat. Sedangkan kasus yang ditangani adalah kasus adat dan non adat (campuran). Kasus adat atau kasus non adat adalah suatu pelanggaran delict adat dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap delict hukum / undang-undang (MPLA, 1989/1990:38). Yang merupakan kasus daerah Bali adalah kasus-kasus yang bertentangan dengan Tri hita karena, penyelesaian dari masalah tersebut sepatutnya diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat, pelanggaran adat yang sudah diputus secara adat biasanya berupa tri danda yakni jiwa danda, artha danda dan penyangaskara. Sedangkan masalah-masalah di luar adat yang menyangkut pelanggaran delict dalam KUHP dan atau delict dalam peraturan perundang-undangan diputus oleh pengadilan negeri. Bila terdapat kasus campuran (yang menyangkut pelanggaran adat dan non adat), maka sanksi dikenakan juga menyangkut dua

sanksi yakni sanksi adat berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.1.6.2 Banjar

Kata banjar merupakan istilah asli yang terdapat di Indonesia. Kata itu dalam bahasa Bali Kuna dan juga dalam bahasa Jawa Kuna. Di dalam prasasti Gobleg Pura Desa I yang berangka Tahun 836 Saka atau 914 Masehi yang memakai bahasa Bali Kuna dijelaskan: "... ser tunggalan banjar di Indra Pura... yang artinya seorang pengawas untuk lingkungan atau kelompok di Indra Gods, 1954:61). Sedangkan dalam Bahasa Jawa Kuna terdapat juga kata banjar yang berarti baris atau lingkungan (Wojowasito, 1973:200).

Kata banjar *ctapat piña* berarti jajar atau berderet ke samping. Kata banjar di Bali berarti kelompok, seperti dalam kata *mabanjar* berarti masuk kelompok suatu unit sosial di Bali. "Banjar merupakan kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa adat dan menjadi bagian dari desa adat serta merupakan persekutuan hidup sosial. Kadang-kadang di daerah pegunungan, satu desa yang kecil sama dengan satu banjar" (MPLA Dati I Bali, 1989/1990:27).

Apabila ditelusuri dengan lebih seksama, maka akan ditemui kelompok sosial yang hidup di lingkungan masyarakat Bali, dimana terjadinya kelompok-kelompok sosial itu berdasarkan atas faktor-faktor yang akan menentukan corak dan kepentingan dari kelompok-kelompok itu sendiri. Berdasarkan hal itu maka banjar merupakan pengelompokan sosial berdasarkan atas persekutuan hidup setempat atau kesatuan wilayah. Selain banjar di Bali terdapat pengelompokan sosial yang lain seperti:

1. Pengelompokan sosial yang berdasarkan atas persekutuan kekerabatan, seperti adanya tunggalan *sanggah*, atau tunggal kawitan yang mengandung ketunggalan silsilah,
2. Pengelompokan sosial yang berdasarkan atas kesatuan siwa, maksudnya pengelompokan sosial yang berdasarkan atas seorang pendeta yang dijadikan pimpinannya bersama dalam penyelenggaraan upacara agama. Di Bali kelompok sosial seperti ini disebut *sisya*, sedangkan pendetanya yang dijadikan pimpinan disebut dengan siwa,
3. Pengelompokan sosial yang mempunyai tujuan tertentu dalam suatu usaha bersama yang disebut seka atau sekeha, seperti sekeha manyi, memula, numbeg dan lain sebagainya,
4. Pengelompokan sosial yang berdasarkan atas kesenangan dalam hiburan yang disebut seka gong, seka drama, seka arja, dan lain sebagainya,
5. Pengelompokan sosial yang berdasarkan atas suatu kebaktian dalam suatu zat suci atau pura yang disebut *pamaksana*, seperti pamaksan Pura Dalem Pamaksan, pamaksan Pura Desa dan lain sebagainya,
6. Pengelompokan sosial yang berdasarkan atas kebersamaan dalam suatu sistem pertanian tradisional yang disebut subak atau krama carik (Majelis Pembina Lembaga Adat, 1989/1990:98).

Demikian masyarakat Bali dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ada yang berazaskan kebersamaan, berazaskan kekeluargaan, rasa bhakti dan lain-lain. Sedangkan banjar sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan tempek. Nama tempek itu biasanya menurut

letaknya dilihat dari Bale Agung atau posisi bale banjarnya, misalnya tempek kauh, tempek kangin, tempek kelod dan lain-lain. Pembagian tempek ini semata-mata untuk memudahkan pengaturannya, terutama dalam melakukan pekerjaan bersama. Pembagian ini tentu saja tidak berlaku bagi banjar yang jumlah warga atau wilayahnya kecil.

Banjar dipimpin oleh seorang kelihan Banjar, sedangkan tempek dipimpin oleh seorang Kelihan Tempek. Struktur organisasi banjar di Bali sangat bervariasi, baik dilihat dari segi komposisi pengurusnya serta jumlah maupun nama-nama personalnya.

Mengenai keanggotaan banjar, mereka yang telah memasuki hidup berumah tangga, diwajibkan untuk menjadi krama banjar atau anggota banjar. Untuk menentukan keanggotaan banjar dipergunakan dua sistem yaitu sistem *karang ayahan* (mereka yang menempati tanah desa adat dikenakan wajib kerja bakti dan dikenakan iuran untuk kepentingan desa) dan sistem *mapakuren* (yang telah berkeluarga) (MPLA Dati I Bali, 1989/1990:31).

Sifat keanggotaan banjar tidak tertutup dan terbatas kepada orang-orang asli yang lahir di dalam banjar itu juga. Demikian kalau ada orang-orang dari wilayah lain, atau yang lahir di banjar lain yang kebetulan tinggal di sekitar banjar yang bersangkutan, mau menjadi warga, hal itu bisa saja.

Pusat dari banjar adalah bale banjar di mana para warga banjar saling bertemu dan mengadakan rapat pada hari-hari yang tetap.

Banjar dikepalai oleh seorang kepala yang disebut klian banjar (klian). Ia dipilih untuk masa jabatan yang tertentu oleh warga banjar. Tugasnya tidak hanya menyangkut segala urusan dalam lapangan kehidupan sosial dan banjar sebagai suatu komunitas, tetapi juga lapangan kehidupan keagamaan. kecuali itu, ia seringkali juga harus memecahkan soal-soal yang menyangkut hukum adat tanah dan dianggap ahli dalam adat banjar pada umumnya. Adapun soal-soal yang bersangkutan dengan irigasi dan pertanian, biasanya di luar wewenangnya. Hal itu adalah wewenang organisasi subak, yang telah tersebut di atas. Walaupun di dalam rangka tugas administratif, di mana Ia bertanggung jawab pada pemerintah di atasnya, Ia tak dapat melepaskan diri sama sekali dan soal-soal irigasi dan pertanian di banjarnya. Di samping mengurus persoalan Ibadat, baik mengenai banjar sendiri, maupun warga banjar, klian banjar juga mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi pemerintahan.

4.1.7 Sistem Keekerabatan

Manusia di dalam hidupnya terikat dalam suatu sistem ekerabatan atau aturan keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai aturan dan norma-norma yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan keekerabatan atau hubungan keluarga ini dapat diamati dari lingkaran hidup (*life circle*) dari tahap kandungan sampai meninggal.

Van Gennep (1975) dalam Yudha Triguna, dkk, (1997:56) mengatakan bahwa:

“pada tahap-tahap pertumbuhannya sebagai individu, sejak ia lahir, masa kanak-kanak, menjadi dewasa dan menikah, selanjutnya menjadi orang tua dan meninggal, manusia mengalami perubahan secara biologis serta perubahan dalam lingkungan sosial budaya yang dapat mempengaruhi tahap pertumbuhannya yang baru maka dalam lingkaran hidupnya itu manusia juga memerlukan regenerasi semangat kehidupan sosial tadi. Van Gennep malahan menganggap rangkaian ritus dan upacara sepanjang tahap-tahap pertumbuhan, atau lingkaran hidup individu (*Life of circle*) itu sebagai rangkaian ritus dan upacara yang paling penting dan mungkin paling tua dalam masyarakat kebudayaan manusia”.

Keekerabatan pada dasarnya menunjuk pada hubungan darah, dan yang dimaksud dengan kerabat adalah mereka yang memiliki pertalian darah atau hubungan darah. Hubungan keekerabatan dapat diamati dari suatu proses perkawinan yang menimbulkan berbagai konsekwensi dalam sistem keekerabatan seperti adanya keturunan (anak), menantu, cucu dan lain sebagainya. Hubungan keekerabatan memuat berbagai aturan dan berbagai

norma yang harus diikuti dan mengatur setiap orang yang ada dalam suatu jalinan kekerabatan itu sendiri, misalnya dalam memilih pasangan hidup, melakukan hubungan biologis, dan juga mengatur hubungan sosial diantara mereka serta mengatur peranan setiap orang dalam sistem kekerabatan itu.

Mengenai perkawinan, dalam konsep Hindu dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap orang (yang normal) untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta dapat menurunkan preti sentana dalam rangka menebus dosa-dosa orang tua yang telah meninggal. Perkawinan itu merupakan kodrat manusia dan kewajiban manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia. Umat Hindu memandang bahwa perkawinan merupakan yadnya (kewajiban suci) untuk mendapatkan keturunan yang baik disebut dengan istilah suputra.

Dalam masyarakat tertentu perkawinan dianjurkan untuk kawin di luar batas-batas suatu lingkungan tertentu yang disebut dengan istilah exogami. Namun menurut Koentjaraningrat, (1977:91), istilah exogami ini mengandung pengertian yang relatif, dan mesti ditentukan batas perkawinan exogami itu. Kalau orang dilarang kawin dengan saudara kandun gnya, maka disebut dengan exogami keluarga inti. Kalau orang dilarang kawin dengan orang yang memiliki kesamaan marga, maka disebut dengan exogami marga, kalau orang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari desa yang sama maka disebut dengan exogami desa, demikian seterusnya. Lawan dari istilah exogami

adalah endogami. Pengertian endogami juga relatif dan harus diterangkan dalam batas-batas saja.

Dalam sistem kekerabatan Hindu sudah diatur tentang pembatasan jodoh dalam perkawinan seperti terdapat dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Bab III pasal 5 yang menguraikan bahwa: “Seorang gadis yang bukan sapinda dari garis ibu, dan juga tidak dari keluarga yang sama dari keluarga bapak dianjurkan untuk dikawini oleh seorang dwi jati”. Menurut ketentuan itu dianjurkan untuk kawin dengan perempuan dan laki-laki yang bukan keluarga (exogami keluarga).

Suatu istilah yang penting dari istilah endogami adalah istilah perkawinan sumbang (*inscest*). Model perkawinan ini menyiratkan akan adanya suatu norma aturan perkawinan yang dilanggar. Dalam konteks ini perkawinan Hindu menetapkan beberapa larangan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Gamia Gamana antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus ke atas dan ke bawah baik karena lahir dalam perkawinan yang sah maupun tidak sah menurut agama Hindu atau karena peperasan dalam garis yang menyimpang antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak sah atau karena peperasan.
- 2) Antara saudara kandungnya, saudara tirinya melalui perkawinan yang sah maupun tidak sah atau karena peperasan,
- 3) Antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya atau seorang wanita dengan ayah tirinya, dan

- 4) Antara mertua dengan menantu atau warang (besan) (Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, 1976:10).

Pada sejumlah sistem kekerabatan peranan anak dari sistem kekerabatan amat penting baik dalam sistem kekerabatan patrilineal maupun sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, peranan sistem kekerabatan kurang begitu penting, sedangkan dalam sistem kekerabatan patrilineal mempunyai anak merupakan hal yang sangat penting terutama anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki bukan hanya dianggap sebagai pelanjut keturunan atau penerus silsilah keluarga dan sebagai pewaris, akan tetapi dikaitkan dengan tata moral dan kewajiban-kewajiban immaterial. Hal itu tampak jelas terlihat dalam sistem kekerabatan Hindu di Bali. Lebih dari itu kedudukan anak laki-laki dikaitkan dengan aspek religius yang dimuat dalam berbagai kitab suci sebagai dan dianggap penyelamat orang tua dari mereka sesuai dengan makna kata put dari kata putra.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bahwa kedudukan anak laki-laki atau suputra dalam sistem kekerabatan memiliki peran yang amat penting sebagai pelanjut keturunan dan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban imaterial seperti dalam pemujaan leluhurnya, dan kewajiban lain yang mesti diembannya, tetapi tidak berarti bahwa dalam sistem kekerabatan di Bali menyingkirkan peranan wanita, karena dalam keadaan tertentu dimana dalam suatu keluarga tidak terdapat suputra atau anak laki, maka anak

perempuan dapat menjalankan peran atau kewajiban inmaterial seorang laki-laki terutama apabila anak wanita tersebut telah kawin dalam bentuk sentana rajeg (wanita berkedudukan sebagai seorang laki-laki/purusa). Dalam statusnya sebagai seorang laki-laki (purusa) seorang wanita dapat mengawini laki-laki lain untuk kemudian ditarik dan dimasukkan ke dalam rumpun keluarga wanita. Dalam kondisi ini lelaki tersebut berstatus purusa dan tunduk pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga wanita.

Akibat dari suatu perkawinan maka terbentuklah keluarga inti yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Apabila kelompok kekerabatan yang terdiri dari satu keluarga inti, tetapi yang seluruhnya merupakan kesatuan sosial yang amat erat, ada yang biasanya hidup bersama pada suatu tempat artinya dalam rumah atau suatu pekarangan disebut dengan keluarga luas (Koentjaraningrat, 1977). Selanjutnya Koentjaraningrat, membedakan keluarga luas sebagai berikut:

- 1) Keluarga luas utrolokat, yang berdasarkan adat utrolokal dan yang terdiri dari suatu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga batih dari anak laki-laki maupun perempuan,
- 2) Keluarga luas varilokal, yang berdasarkan atas adat variloka dan yang terdiri dari suatu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti dari anak laki-laki,
- 3) Keluarga luas uzorilokal yang berdasarkan adat uzorilokal dan yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga batih dari anak-anak perempuan.

Keluarga luas yang paling banyak dianut oleh keluarga Hindu adalah keluarga luas jenis kedua yaitu verilokal yang di Bali disebut Pakurenan. Dalam penataan rumah tangga, kalau seluruh anggota keluarga luas makan bersama di dapur yang sama disebut dengan *ngerob* (Yudha Triguna, dkk., 1997:86). Dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa peranan penting dari suatu luas adalah:

1. melaksanakan pengasuhan dan pendidikan bagi angkatan berikutnya,
2. membina dan melaksanakan aktivitas ekonomi dalam bentuk rumah tangga dan produksi,
3. memelihara dan menguasai sejumlah harta milik
4. menyelenggarakan aktivitas upacara keluarga dalam bidang adat dan agama,
5. anggota keluarga batih berperan dalam proses pengambilan keputusan mengenai beberapa hal tertentu dalam segi kehidupan keluarga, seperti: upacara, perkawinan dan lain-lain.

Kelompok kekerabatan yang lebih luas dari keluarga inti dan merupakan kumpulan dari beberapa keluarga inti tetapi masih memiliki hubungan darah, bersifat patrilineal, dan memuja kawitan atau leluhur yang sama tergabung dalam suatu kelompok kekerabatan yang disebut dengan *dadia*, *merajan*, atau *panti*. Dalam perkembangannya saat ini kumpulan dari beberapa *dadia*, *merajan* atau jumlah yang besar dan memuja leluhur yang sama dalam suatu (tempat suci bagi golongan tertentu) sering disebut dengan *warga*, seperti: *Warga Pasek*, *Warga Pande*, dan lain-lain.

Perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena dengan itu barulah ia dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat dan baru sesudah itu ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seorang warga komuniti dan warga kelompok kerabat.

Menurut anggapan adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem kien-klen (dadia) dan sistem kasta (wangsa), maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan di antara warga se-klen, atau setidaknya antara orang-orang yang sederajat dalam kasta. Demikian, perkawinan adat di Bali itu bersifat endogami klen, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan oleh orang Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki. Keadaan ini memang agak menyimpang dari lain-lain masyarakat yang berklen, yang umumnya bersifat exogami. Orang-orang se-klen (tunggal kawitan, tunggal dadia, tunggal sanggah) di Bali itu, adalah orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan demikian juga dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk dalam batas klen-nya, terjalalah kemungkinan-kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dari roda-roda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar-kasta yang berbeda derajatnya. Dalam hal ini terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta yang tinggi jangan sampai kawin dengan orang lebih rendah derajat kastanya, karena perkawinan serupa itu akan membawa malu kepada keluarga, serta menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak wanita itu. Dahulu

apabila terjadi perkawinan campuran yang demikian, maka wanita itu dinyatakan keluar dari dadia-nya, dan secara fisik suami istri akan dihukum buang (*maselong*) untuk beberapa lama, ke tempat yang jauh dari tempat asalnya. Semenjak tahun 1951, hukum semacam itu tidak pernah dijalankan lagi, dan pada waktu ini perkawinan campuran antar-kasta sudah relatif banyak dilaksanakan.

Bentuk perkawinan yang paling populer di kalangan masyarakat Bali perkawinan antara kasta adalah bentuk perkawinan pinang, *jajangkepan* (dijodohkan), kawin lari (lari bersama), sedangkan bentuk perkawinan yang dianggap pantang dalam tradisi Bali adalah bentuk perkawinan *melegandang*. Bentuk perkawinan ini disamping melanggar adat dan agama, juga dianggap melanggar hukum. Berkenaan dengan itu bentuk perkawinan ini sudah lama ditinggalkan. Kemudian ada lagi bentuk perkawinan yang dianggap pantang yakni perkawinan bertukar antara saudara perempuan suami dengan saudara laki (*makedengan ngad*) karena perkawinan yang demikian itu dianggap mendatangkan bencana (*panes*). Perkawinan pantang yang dianggap melanggar norma kesusilaan sehingga merupakan sumbang yang besar (*gamia gamana*) adalah perkawinan antara seorang dengan anaknya, antara seorang dengan sekandung atau tirinya, dan antara seorang dengan anak dan saudara perempuan maupun laki-lakinya (*keponakannya*).

Pada umumnya, seorang pemuda Bali itu dapat memperoleh seorang istri dua cara, yaitu dengan cara meminang (*memadik, ngidih*) kepada seorang gadis, atau dengan cara melarikan seorang gadis (*mrangkat, ngrorod*) Kedua cara itu berdasarkan adat.

Adat perkawinan Bali meliputi suatu rangkaian peristiwa-peristiwa seperti resmi dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si gadis untuk meminang si gadis atau memberitahukan kepada mereka bahwa si gadis telah dibawa lari untuk dikawin; upacara perkawinan (*masakapan*); dan akhirnya lagi suatu kunjungan resmi dari keluarga si pemuda ke rumah orang tua si gadis untuk minta diri kepada para roh nenek moyangnya. Di beberapa daerah di Bali (tidak semua daerah), berlaku pula adat penyerahan mas kawin (*patuku luh*), tetapi rupa-rupanya adat ini sekarang terutama diantara keluarga-keluarga orang-orang terpelajar, sudah menghilang.

Sesudah pernikahan, suami istri baru biasanya menetap secara virilokal di kompleks perumahan (*umah*) dari orang tua si suami, walaupun tidak sedikit juga suami istri baru yang menetap secara neolokal dan mencari atau membangun rumah baru. Sebaliknya, ada pula suatu adat perkawinan di mana suami istri baru itu menetap secara uxorilokal di kompleks perumahan dari keluarga si istri (*nyeburin*). Tempat di mana suami istri itu menetap, menentukan perhitungan garis keturunan dan hak waris dari anak-anak dan keturunan mereka selanjutnya. Kalau suami istri tinggal secara virilokal,

maka anak-anak mereka dan keturunan mereka selanjutnya akan diperhitungkan secara patrilineal (purusa), dan menjadi warga dari dadia si suami dan mewarisi harta pusaka dari klen itu. Demikian pula anak-anak dan keturunan dari mereka yang menetap secara neolokal. Sebaliknya, keturunan dari suami istri yang menetap secara uxori-loka akan diperhitungkan secara matrilineal menjadi warga dadia si istri, dan mewarisi harta pusaka dari klen itu. Dalam hal ini kedudukan si istri adalah sebagai sentana (pelanjut keturunan).

4.1.7.1 Struktur Keluarga

“Kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat Bali yang terkait akibat perkawinan disebut kuren atau somah. Dengan kata kuren yang berarti dapur dan somah (sa-umah) berarti satu rumah tangga” (Putra Agung, 1974:65). Dalam konteks pengertian tersebut, maka apabila seseorang membentuk suatu keluarga baru (kawin), berarti keluarga baru itu membentuk satu dapur, yang merupakan suatu kesatuan kehidupan ekonomi rumah tangga.

Akibat lebih lanjut dari perkawinan itu adalah terbentuknya suatu keluarga batih. Bentuk keluarga batih ini tergantung pula dari macam perkawinan itu. Karena poligini (atau poligami) diijinkan, maka ada juga

keluarga-keluarga batih yang sifatnya poligini. Walaupun demikian, keluarga-keluarga yang bersifat poligini ini hanya terbatas dalam lingkungan-lingkungan tertentu saja yang jumlahnya tidak banyak.

Suatu rumah tanga di Bali biasanya terdiri dari suatu keluarga batih yang bersifat monogami, sering ditambah dengan anak laki-laki yang sudah kawin bersama keluarga batih mereka masing-masing dan dengan lain-lain orang yang menumpang, baik orang yang masih kerabat maupun yang bukan kerabat (pembantu rumah tangga dan lain-lain). Sesudah beberapa waktu, kalau seorang anak laki-laki sudah maju dalam masyarakat sehingga ia merasa mampu untuk berdiri sendiri, ia memisahkan diri dari rumah tangga orang tua dan mendirikan rumah dan rumah tangga sendiri yang baru (ngarangin). Salas satu dari anak laki-laki biasanya tetap tinggal di kompleks perumahan orang tua (ngerob), untuk nanti dapat membantu orang tua kalau mereka sudah tidak berdaya lagi dan untuk menggantikan dan melanjutkan rumah tangga orang tua. Dengan demikian, sebenarnya suatu rumah tangga yang sudah tua terdiri dari suatu keluarga luas virilokal yang terdiri dari suatu keluarga batih senior dengan beberapa keluarga batih yunior yang hidup bersama dalam satu kompleks perumahan (umah) sebagai kesatuan yang formil.

4.1.7.2 Eksistensi Klen dalam Masyarakat Bali

Tiap-tiap keluarga batih maupun keluarga luas, dalam sebuah desa di Bali harus memelihara hubungan dengan kelompok kerabatnya yang lebih luas yang disebut dengan klen (tunggal dadia). Struktur dari tunggal dadia ini berbeda-beda diberbagai tempat di Bali. Di desa-desa di pegunungan, orang-orang dari tunggal dadia yang telah memencar karena hidup neokal, tidak usah lagi mendirikan tempat pemujaan leluhur di masing-masing tempat kediamannya. Di desa-desa di tanah dataran, orang-orang dari tunggal dadia yang hidup neokal wajib mendirikan tempat pemujaan di masing-masing tempat kediamannya, yang disebut kemulan taksu. Disamping itu, keluarga batih yang hidup neokal seperti juga masih terikat oleh dan masih mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pura asal (dadia atau sanggah) di rumah orang tua mereka. Suatu pura di tingkat dadia merayakan upacara-upacara sekitar lingkungan hidup dari semua warganya, dan solidaritet anggota-anggota dari suatu klen kecil.

Disamping itu ada lagi kelompok kerabat yang lebih besar yang dilengkapi beberapa kerabat tunggal dadia (sanggah) yang memuja pura leluhur yang sama disebut pura, paibon atau panti. Kelompok kerabat yang demikian dapat disebut klen besar.

Untuk memberikan ikatan spiritual, keluarga ikatan yang disebut dengan dadia ini dipergunakan sebagai sanggar pemujaan bagi keluarga untuk memuja roh-roh suci seperti:

1. Kelab (*Eyang*) yang telah meninggal sebagai leluhur disebut Dewa Hyang yang juga disebut dengan Gelar Aditya menurut kitab Purana. Beliau digolongkan Pra Pita Maha.
2. Kakek yang telah meninggal sebagai leluhur (Pitara) disebut Dewa Hyang juga disebut gelar Rudra.
3. Orang tua yang telah meninggal yang juga sebagai (Pitara) disebut Dewa Hyang juga disebut gelar Dewa Wasu (Pudja, 1985:192).

Dalam praktek, suatu tempat pemujaan ditingkat paibon juga hanya mempersatukan suatu lingkaran terbatas dari kaum kerabat yang masih dikenal hubungannya saja. Klen-klen besar sering juga mempunyai suatu sejarah asal usul yang ditulis dalam bentuk babad dan yang disimpan sebagai pusaka oleh salah satu dari keluarga-keluarganya yang merasakan dirinya senior, ialah keturunan langsung dan salah satu cabang yang tua dalam klen.

Riwayat terbentuknya keluarga mempunyai sejarah yang penting, dan apabila digali lebih jauh mereka akan merupakan suatu ikatan turun temurun yang lebih besar dan luas yang disebut dengan nama Gotra dan Prawara. Gotra dan Prawara memiliki sejarah yang sama dengan terbentuknya marga. Di Bali dikenal berbagai jenis keluarga atau semacam gotra dan prawara, seperti Keluarga Pasek, Keluarga Pande, Keluarga Manuaba, dan lain-lain. Keluarga-keluarga ini diikat oleh satu kesatuan tempat peribadatan yang dilandasi oleh satu ikatan leluhur yang disebut dengan istilah Pedharman.

Selanjutnya Pedharman ini dipergunakan oleh mereka yang merasa satu ikatan keluarga, baik dilihat dari garis keibuan maupun dari garis kebapakan (Pudja, 1985:191-194).

4.1.8 Sistem Pelapisan Masyarakat Bali

Secara garis besarnya masyarakat Bali terstratifikasi dalam sistem warna, sistem menurut jati (kelahiran), sistem asrama, sistem kepercayaan dalam berbagai mazhab Hindu, dan sistem pelebagaan sosial (Pudja, 1985:195). Sementara itu Bagus (1994:305) mengemukakan bahwa sistem pelapisan masyarakat Bali berdasarkan atas keturunan yang kemudian dikaitkan dengan kelompok kerabat yang bersifat patrilineal.

Ada pelbagai klen yang mempunyai sejarah keturunan (babad, pamancangah, pretasti) sendiri-sendiri yang masing-masing kembali sampai pada sejarah penaklukan oleh Majapahit dalam abad ke-14. Orang-orang bangga apabila dapat menyusur keturunan mereka sampai pada raja-raja atau bangsawan-bangsawan dari zaman Majapahit itu. pelbagai keturunan inilah yang memberikan susunan yang lebih kompleks pada klen-klen patrilineal yang terdapat di Bali dataran. Karena proses sejarah yang kembali ke zaman Majapahit, maka klen-klen di Bali daerah dataran, tersusun dalam suatu susunan berlapis tinggi rendah berdasarkan hubungan kekerabatan dari nenek

moyang-nenek moyang dari klen-klen itu. dengan seorang tokoh raja atau bangsawan dari Majapahit. Di Bali daerah pegunungan, susunan klen berlapis tinggi-rendah serupa itu tidak ada; bahkan batas-batas antara klen-klen dalam kehidupan masyarakat tidak tampak begitu nyata.

Susunan tinggi-rendahnya dari klen-klen di daerah dataran tampak pada gelar-gelar yang dipakai oleh warganya di depan nama mereka. Gelar-gelar itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan atas sistem pelapisan wangsa. Sistem ini terpengaruh oleh sistem kasta yang termaktub dalam kitab-kitab suci agama Hindu Kuno, ialah sistem keempat kasta: Brahmana, Ksatria, Vaisya dan Sudra. Di Bali wangsa-wangsa dalam sistem pelapisan mempunyai sebutan yang sama, ialah Brahmana, Satria, Wesia, dan Sudra, dan lapisan keempat biasanya disebut jaba. Hanya sebagian kecil dari rakyat Bali, kurang dari 15%, termasuk Triwangsa, lagipula warga klen-klen besar yang termasuk Triwangsa biasanya tersebar luas di seluruh Bali. Sebaliknya, lebih dari 85% dari rakyat Bali termasuk warga Jaba, dan warga klen-klen yang termasuk Jaba tingginya lebih terpusat pada daerah-daerah terbatas (Bagus dalam Koentjaraningrat, 1997:300).

Gelar-gelar bagi warga klen-klen Brahmana adalah Ida Bagus untuk laki-laki, dan Ida Ayu untuk wanita; gelar bagi warga klen-klen Satria adalah Cokorda, dan bagi warga klen-klen Wesia adalah Gusti. Kecuali itu banyak gelar-gelar lain yang diturunkan oleh klen-klen tertentu tetapi yang kurang

terang mengenai kedudukannya dalam Wangsa. Pemegang gelar-gelar serupa itu tentu akan mengakunya sebagai gelar wangsa tinggi, lainnya berpendapat bahwa gelar-gelar serupa itu termasuk wangsa-wangsa yang rendah dan demikian selalu memang ada perselisihan mengenai kedudukan dari orang-orang yang mempunyai gelar-gelar tadi, dalam upacara adat dan dalam sopan santun pergaulan orang Bali.

Zaman modern dengan pendidikannya telah banyak membawa perubahan dalam sistem pelapisan wangsa ini. Misalnya undang-undang yang menghukum adanya perkawinan antara gadis yang lebih tinggi dengan laki-laki yang wangasanya lebih rendah telah dihapuskan. Pendeta-pendeta tidak usah lagi asal dari wangsa Brahmana, dan akhir-akhir ini mereka malahan sudah dianggap sederajat dengan pendeta-pendeta dari wangsa Brahmana.

Kesatuan sosial terurai di atas, ialah desa, banjar, subak, maupun seka biasa mempunyai pemimpinnya dan mempunyai kitab-kitab peraturan tertulis yang disebut awig-awig atau sima. Pemimpin dari kesatuan-kesatuan sosial seperti itu biasanya dipilih oleh warganya, sungguhpun di beberapa tempat di Bali kedudukan kepala banjar (klian), berdasarkan atas keturunan.

Klen-klen juga mempunyai seorang tokoh penghubung yang bertugas memelihara hubungan antara warga-warga klen, menjadi penasehat bagi para warga mengenai seluk beluk adat dan peristiwa-peristiwa yang bersangkutan

paut dengan klen, mengurus pemeliharaan pura-pura klen, serta mengurus upacara-upacara klen di tempat-tempat pemujaan tersebut. Tokoh klen serupa itu, disebut moncol. Klen biasanya tidak mempunyai peraturan-peraturan tertulis, tetapi seperti apa yang telah tersebut di atas, sering mempunyai silsilah-silsilah tertulis (badbad).

Di tingkat desa ada juga kesatuan-kesatuan administratif yang disebut perbekelan. Suatu perbekelan yang sebenarnya merupakan kreasi dari atas, ialah dari pemerintah jajahan Belanda, diletakkan di atas kesatuan-kesatuan adat yang asli di Bali, seperti desa adat dan banjar. Maka dari itu terdapatlah gabungan-gabungan desa dan banjar ke dalam suatu perbekelan di bawah seorang pejabat administratif yang disebut perbekel atau bendesa. Seorang perbekel secara administratif bertanggung jawab kepada atasannya yaitu camat, dan sebaliknya camat bertanggung jawab kepada bupati.

4.2 Persepsi Masyarakat terhadap Kearifan Lokal dalam Kehidupan Beragama Hindu di Bali

Kearifan lokal merupakan proses dialektika antara individu dengan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan respon individu terhadap kondisi lingkungannya. Pada aras individu, kearifan lokal muncul sebagai hasil proses kerja kognitif individu sebagai upaya menetapkan pilihan nilai-nilai

yang dianggap paling tepat bagi mereka. Pada aras kelompok, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungan yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan (Ridwan, 2010:1).

Masyarakat Bali sangat mencintai alam dan memiliki wawasan lingkungan. Mereka tidak dapat dipisahkan dari alam sekitar atau lingkungannya, yaitu masyarakat Bali sangat percaya dengan alam sekitarnya yang disebut dengan ajaran *tri hita karana*. *Tri hita karana* adalah tiga penyebab kebahagiaan, artinya masyarakat Bali meyakini bahwa kebahagiaan itu dapat diwujudkan apabila terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta, hubungan manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagai tempat hidup. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai semua aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan yang lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari diri pada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai (Wikipedia, 2013).

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat setempat.

Berkenan dengan hal tersebut, maka beberapa informan memberikan persepsi tentang kearifan lokal dalam kehidupan beragama Hindu yang ada di Bali sebagai berikut. Informan Dewa Ketut Djareken dalam petikan wawancara menguraikan sebagai berikut.

“ kearifan lokal adalah hal-hal atau sesuatu yang berjalan pada sebuah desa yang masih bersifat tradisional. Dalam *catur dresta* yang termasuk kearifan lokal adalah *kula dresta* itulah kearifan lokal karena itu harus dilindungi. Oleh karena demikian mengacu pada payung hukum dengan perda No. 03 Tahun 2001 yo.2003 dijelaskan bahwa sebuah desa tradisi yang harus dipelihara harus dilindungi sebagai pilar penunjang agama itu sendiri. Kita merasa khawatir juga secara logika melanggar *dresta-dresta* yang ada. Termasuk Buleleng yang dikatakan sangat dinamis dan cepat terpengaruh oleh budaya-budaya luar, namun kearifan lokal masih banyak dipertahankan. Seperti halnya upacara-upacara mecaru masih tetap dilaksanakan, walaupun bahan – bahan yang diperlukan sangat susah dicari, tetapi masih bisa ditemukan atau masih ada yang tersedia” (Wawancara,5 Juli 2013).

Berdasarkan narasi di atas, jika dikaitkan dengan pendapat Rahyono (2009:164-165) dinyatakan bahwa religi pada dasarnya adalah suatu keyakinan bahwa di dalam kehidupan ada kekuatan yang mengatasi manusia. Manusia percaya bahwa diluar kekuatannya terdapat kekuatan gaib, kekuatan adikodrati yang mengatasi dan mengatur kehidupan dari kodrat manusia. Hal senada juga dipertegas oleh Magetsari dalam Rahyono (2009:165) bahwa, religi mencakup dua pengertian yaitu (1) berkenaan dengan kepercayaan, dan (2) tindakan atau kebiasaan yang berkaitan dengan apa yang dipercaya. Hal yang dipercaya adalah sesuatu yang gaib yang berada di luar diri manusia

serta memiliki kemampuan dan kekuatan yang melebihi dirinya. Sesuatu yang gaib itu dapat mempengaruhi dan mengatur kehidupan manusia.

Tindakan yang terkait dengan apa yang dipercaya diwujudkan dalam bentuk kearifan lokal yang berupa jalinan komunikasi antara manusia dan alam semesta yang memiliki kekuatan adiodrati tersebut. Kebudayaan Bali mengidentifikasikan manusia manusia dan alam semesta memiliki kesamaan yakni sebagai dunia kehidupan dengan perbedaan peran. Relasi yang dibangun oleh orang Bali dengan alam semesta terstruktur dalam aspek religi yang berupa *bhuana alit* dan *bhuana agung* (mikrokosmos dan makrokosmos). Oleh karena itu ada ketergantungan manusia kepada alam semesta, serta perlunya jalinan hubungan bhatiniah antara manusia dan alam semesta. Maka setiap manusia perlu melakukan tindakan yang mengupayakan kedamaian dunia. Pernyataan yang merepresentasikan upaya itu diruskan dalam proposisi *mapahayuning bhuana* yang artinya menciptakan suasana ketentraman dunia.

Terkait dengan revitalisasi kearifan lokal di Bali dalam kaitannya dengan kehidupan Beragama khususnya umat Hindu, sebagaimana kutipan wawancara dengan Dewa Ketut Djareken berikut ini.

“Revitalisasi kearifan lokal sangat penting dilakukan, karena merupakan emosi keagamaan sebagai lokal genius seperti *nyepi* lokal, *nyepi segara*, *nyepi* di sawah dan lainnya. Semua tradisi-tradisi *nyepi* yang ada di Bali dilindungi oleh Majelis desa Pakraman. Jika itu dilepaskan maka lepas dengan pegangan agama dan pelaksanaannya dilakukan dengan adat-adat setempat sebagai *local genius*”(Wawancara, 5 Juli 2013).

Berdasarkan paparan informan di atas bahwa perayaan hari nyepi merupakan penghormatan terhadap *bhuana agung* dan *bhuana alit* agar kita senantiasa *mulat sasrira* dalam menjalani hidup ini. Dalam tradisi *nyepi* apapun bentuk dan corak pelaksanaannya, sesungguhnya merupakan perenungan diri akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam beserta isinya. Kearifan lokal yang dapat ditangkap dari perayaan – perayaan nyepi di Bali merupakan kesabaran yang merupakan sikap yang dapat membangun suasana harmonis hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Apabila mitos dan ritual nyepi tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang ternyata dapat membantu kehidupan masyarakat khususna petani modern. Kesombongan teknologi dapat meninggalkan semua yang bernuansa tradisi. Kemajuan teknologi yang dikuasai oleh kapitalis seringkali merusak lingkungan. Wibowo (2007:218) menegaskan kondisi ini menjadi lebih parah ketika teknologi mencoba memperkosa lingkungan hidup dengan mengabaikan semua alam pikiran tradisi serta kecerdasan lokal.

Terkait hubungan manusia dengan *Kang Murbeng Dumadi* yang menguasai alam semesta, ditemukan proposisi yang berupa kata-kata yaitu *eling*,(ingat), *precaya* (percaya), dan *mituhu* (takwa); sedang dalam hubungan antar manusia, ditemukan proposisi *рила* (ikhlas), *narima*

(menerima/pasrah), *temen* (setia), sabar (sabar), dan *budi luhur* (berbudi luhur). Kedelapan proposisi kata-kata tersebut dalam *Serat Sesangka Jati* disebut Hasta Sila – merupakan jalan untuk mencapai ke *sangkan paraning dumadi*.

Dalam bahasa Jawa kata *eling* digunakan untuk menyatakan kondisi pikiran yang kembali ingat pada hal-hal yang telah lalu atau yang telah terlupakan . Dalam konteks yang lain kata *eling* digunakan untuk menyatakan keadaan seseorang, dalam hal ini perilaku yang beralih dari keadaan yang buruk kembali ke keadaan yang baik.

Kearifan lokal di Bali telah banyak di revitalisasi kedalam awig-awig. Awig-awig adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatuhan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal senada disampaikan oleh informan I Nyoman Chaya dalam wawancara berikut ini.

“di Bali telah banyak kearifan lokal yang hampir punah di masyarakat. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Namun dengan kesadaran masyarakat akan luntarnya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat dan terjadinya berbagai gejolak di masyarakat yang mengakibatkan hancurnya tatanan hidup maka oleh pemerintah Bali pada waktu itu berupaya menyelamatkan kearifan lokal itu dengan membentuk awig-awig.

Tetapi awig-awig itu belum cukup untuk menampung semua tradisi-tradisi yang ada. Oleh karena itu masyarakat berupaya dengan kesadaran sendiri untuk melaksanakan melalui keyakinan masing – masing sehingga apa yang telah dimiliki masih bisa bertahan” (wawancara, 1September 2013).

Berdasarkan narasi di atas jika dikaitkan dengan ungkapan Jawa “*aja dumeh*” yang artinya jangan melakukan kesewenangan. Manusia tidak selayaknya mengagungkan kekuatan kekayaan, kekuasaan, dan apapun yang dia miliki dalam pergaulannya dengan sesame. Setiap orang hendaknya *eling* bahwa apa yang ia miliki selama hidup di dunia adalah sebuah anugrah yang harus disyukuri, digunakan untuk *memayu hayuning bawana*. Apabila anugrah yang diperoleh lebih dari cukup, berlimpah melebihi apa yang diperoleh orang lain hendaknya *eling* (waspadalah), karena orang yang berlimpah biasanya *nggendong lali* membawa sifat lipa diri.

Pesan keaifan yang dikomunikasikan dalam proposisi Jawa itu adalah kesewenangan yang mengagungkan apapun pada diri manusia akan membawa malapetaka. Budaya Bali juga hampir sama dengan proposisi Jawa yaitu *yatna* (hati-hati), *tiaga* (waspada). Jadi apapun yang dilakukan harus berhati-hati, karena itu di Bali setiap melaksanakan penyepian umat Hindu diharuskan *mulat sarira* untuk merenungkan segala tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan agar memperoleh keselamatan.

Dalam hubungan agama dengan kearifan lokal, doktrin agama yang merupakan konsepsi tentang realitas harus berhadapan dengan realitas,

bahkan berurusan dengan perubahan sosial. Dalam perspektif sosiologis agama dilihat fungsinya dalam masyarakat. Salah satu fungsi itu adalah memelihara dan menumbuhkan sikap solidaritas di antara sesama individu atau kelompok. Solidaritas merupakan bagian dari kehidupan sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat beragama atau lebih tepatnya, solidaritas merupakan ekspresi dari tingkahlaku manusia beragama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan I Ketut Wiana sebagai berikut.

“hubungan yang erat antara agama dengan masyarakat dan budayanya dalam bentuk kearifan lokal tidak berarti bahwa agama harus menyesuaikan diri dengan segala yang ada dalam masyarakat begitu saja. Malahan sebaliknya agama diharapkan untuk memberi pengarah dan bantuan untuk memainkan peranan kritis kreatif terhadap masyarakat yang dalam banyak hal memang tidak sinkron. Oleh karena itu para pemeluk agama memiliki pengertian, kepekaan, kesadaran, dan pengetahuan tentang keadaan masyarakat. Inilah yang sangat perlu bagi umat beragama dalam hidup dimasyarakat, sehingga tidak ada benturan –benturan antara agama dengan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat” (Wawancara, 6 Agustus 2013)

Berdasarkan ungkapan informan di atas, jika dirujuk pendapat Ghazali dalam bukunya berjudul “Antropoli Agama” (2011:35-36) sebagai berikut.

“dalam kehidupan masyarakat, agama mempunyai peranan penting karena ia mengandung beberapa faktor yaitu, (1) faktor kreatif yaitu faktor yang mendorong dan merangsang manusia baik untuk melakukan kerja produktif maupun karya kreatif yang menciptakan, (2) faktor inovatif yaitu faktor yang mendorong melandasi cita-cita dan amalan perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan, (3) faktor sublimatif yaitu meningkatkan dan menguduskan gejala kegiatan manusia, bukan hanya dalam hal – hal yang bersifat keagamaan saja, tapi yang bersifat keduniaan, (4) faktor integrative yaitu mempersatukan pandangan dan sikap manusia serta memadukan berbagai kegiatannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota

masyarakat dalam berbagai penghayatan agama guna menghindarkan diri dari ketidak serasian dan perpecahan yang pada gilirannya nanti mampu menghadapi berbagai macam tantangan hidup”.

Apa yang disampaikan oleh informan di atas, sesungguhnya merupakan salah satu pilar pendidikan karakter dalam upaya membudayakan seseorang menjadi anggota masyarakat yang aktif, berbudaya, dan mampu bersosialisasi dalam masyarakat. Lebih lanjut Aunillah (2011) menyatakan bahwa dalam penuatan nilai-nilai pendidikan karakter, semua komponen harus dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan paparan Kementerian Pendidikan Nasional dalam Buku Pengembangan Pendidikan Budaya dan karakter Bangsa yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter pada intinya berfungsi dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa.

Wagiran (2012) menyatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat bersumber dari nilai-nilai yang digali dari budaya masyarakat . Nilai-nilai kearifan lokal bukanlah penghambat kemajuan di era global, namun menjadi kekuatan transformasional yang luar biasa dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal keunggulan kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Oleh karena itu revitalisasi kearifan lokal itu merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan pendidikan karakter pada masyarakat dalam membangun karakter bangsa.

Berkaitan dengan wacana di atas, informan I Gusti Made Ngurah menyampaikan paparan sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

“Kearifan Bali cukup banyak adanya, baik kearifan asli yang muncul dari budaya tradisional etnis Bali, kearifan lokal hasil adopsi dan modifikasi budaya luar maupun kearifan lokal hasil penyerapan ajaran agama Hindu yang menjiwai budaya Bali itu sendiri. Setiap kearifan lokal memiliki penekanan pada satu nilai tertentu untuk dipedomani di dalam masyarakat. Ada penekanan ada nilai kebersamaan, ada pada nilai persaudaraan, ada pada nilai senasib sepenanggungan, nilai semangat keunggulan dalam perjuangan hidup dan motivasi spiritual agama (taksu). Kesemua itu diterima dan dipedomani dalam menata kehidupan bersama dalam masyarakat Bali selama ini. Namun demikian di antara sekian banyak kearifan lokal Bali yang ada, sebagian besar telah dilupakan” (Wawancara, 17 Oktober 2013).

Berkaitan dengan narasi di atas, sebagaimana pendapat Naya Sujana (1994:63-64), bahwa melemahnya manusia Bali dalam mempertahankan citra budaya (*cultural image*) yang berkaitan dengan nilai-nilai kemuliaan sosial dan agama. Dengan munculnya sifat-sifat ambisius untuk menguasai materi dan uang, maka tidak sedikit orang menempuh jalan pintas atau perbuatan tercela, namun Naya Sujana juga melihat adanya perkembangan baru dimana kaum muda Bali mulai mempersiapkan diri untuk memasuki pasca persimpangan jalan, khususnya generasi muda Hindu telah memiliki kegairahan yang cukup berarti untuk merekonstruksi budaya dan adat Bali, serta melakukan revitalisasi dalam pemahaman dan penghayatan agama Hindu. Gerakan rekonstruksionisme dan revitalisasi itu diharapkan dapat

menemukan pola yang lebih sempurna di masa depan dan bukan hanya gerakan sesaat dan gewrakan yang belum jelas tujuannya.

Berdasarkan wacana di atas, bahwa di Bali memiliki banyak kearifan lokal baik yang asli maupun yang merupakan modifikasi, namun sampai saat ini telah banyak dilupakan, oleh karena itulah upaya revitalisasi terhadap kearifan lokal yang ada sangat penting dilakukan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

4.3 Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal di Bali

Kearifan lokal merupakan milik manusia yang bersumber dari nilai-nilai budayanya sendiri dengan menggunakan segenap akal budi, pikiran, hati, dan pengetahuannya untuk bertindak dan bersikap terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Manusia selalu memiliki dua ruang interaksi yakni lingkungan alam dan lingkungan social. Menghadapi dua ruang interaksi itu pada umumnya manusia memiliki kearifan dari tiga sumber yaitu dari nilai budaya yang kita sebut dengan kearifan lokal, dari aturan pemerintah yang lebih modern, dan dari agama. Dengan tiga sumber kearifan itu, manusia menjalani kehidupan dalam ruang interaksi lingkungan alam dan lingkungan social. Pada gilirannya kedua ruang interaksi itu memproduksi nilai dan norma budaya baru yang berlaku pada komunitasnya dan berbeda dengan nilai budaya pada komunitas lainnya. Nilai-nilai tersebut cukup arif sebagai landasan hubungan manusia dengan manusia, dengan alam dan dengan

Tuhan. Atas dasar itu menjadi beberapa bentuk kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu. Ada beberapa bentuk kearifan lokal yang masih berlaku di Bali sebagaimana yang dituliskan oleh Samba dalam bukunya berjudul “Pencarian Ke dalam Diri, merajut ulang budaya luhur bangsa”(2011) sebagai berikut.

4.3.1 Budaya Zaman

Kembali kita berkenalan dengan sebuah kebenaran ajaran para tetua-tetua kita. Kenyataan alam sebagaimana adanya “Tiada yang langgeng di alam ini”. Semua berubah, semua bergerak. Dengan kenyataan seperti itu ungkapannya kemudian di balik. Tiada yang langgeng di alam ini, kecuali perubahan itu sendiri. Tiada sedetikpun bumi berhenti mengitari matahari. Tiada sedetikpun bulan berhenti mengelilingi bumi dan matahari. Semua benda-benda bergerak menurut aturannya masing-masing. Alam manusia juga sama. Manusia berubah dari detik ke detik. Dari awal terbentuknya embryo, membesar, membelah diri berkembang menjadi janin. Membesar dan berkembang menjadi bayi, menjadi anak, remaja, dewasa dan kemudian tua. Kemudian meninggal, kembali ke asalnya, kealam raya ini, menjadi pancamahabutha, api (panas), air, hawa, eter dan debu.

Bukan saja hanya bentuk fisik dari alam mikro manusia dan alam makro bumi dan semesta ini yang berputar, tetapi juga kehidupan sosial-budaya, mental dan spiritual setiap diri manusia dan masyarakat manusia sebagai satu keseluruhan. Para tetua kita menyebutnya dengan istilah “zaman itu berputar”. Kehidupan manusia itu

berputar menurut aturan baku, menurut kodratnya. Perputaran zaman (yuga) ini tidak pernah berhenti, berurutan pada sebuah lingkaran, treta yuga; kerta yuga; duapara yuga; dan kali yuga. Zaman treta akan diikuti oleh zaman kreta yang diikuti kemudian oleh zaman duapara. Zaman duapara akan berakhir dengan zaman kaliyuga dan kembali lagi ke zaman treta, dan demikian seterusnya.

4.3.1.1 Zaman Treta (Treta Yuga)

Adalah zaman tertib aturan, tertib hukum, taat akan dharma (kebenaran, kewajiban dan kode etik). Semua pemimpin dan yang dipimpin taat akan kewajiban masing-masing dan mengikuti aturan serta kode etik dalam melaksanakan tugas peran dan fungsi sosial masing-masing. Dalam kehidupan tertib aturan seperti itu akan diikuti kemudian oleh zaman kerta.

4.3.1.2 Zaman Kerta (Kerta Yuga)

Adalah zaman dimana masyarakat hidup adil, makmur, tiada kelaparan dan kemiskinan, tiada mereka yang berlebihan dan tiada mereka yang kekurangan. Tiada kecemburuan dan pertengkaran, tiada ancaman dan kecemasan, apalagi pembunuhan dan atau peperangan. Semua anggota masyarakat dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan masyarakat sejahtera, adil dan makmur dalam kedamaian. Sebuah masyarakat impian semua masyarakat.

Sebuah masyarakat gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Pemimpin menyatu dengan rakyat yang dipimpinnya. Zaman dimana pemimpin

adalah pengayom, pelindung masyarakat. Zaman dimana pemimpin adalah abdi masyarakat.

4.3.1.3 Zaman Duapara (Duapara Yuga)

Godaan muncul terutama pada mereka yang memegang kekuasaan. “Aku yang memegang kekuasaan akan sangat pantas bila aku boleh memiliki lebih dibandingkan dengan rakyat. Aku raja dan penguasa sangat pantas memiliki hak-hak istimewa, lebih dari yang lainnya”. Dengan berbagai rekayasa, dengan berbagai akal, melalui berbagai aturan dibuat, yang memungkinkan hak-hak para penguasa lebih dari yang lain. Rekayasa hukum dan peraturan dibuat sedemikian rupa sebagai pembenaran. Ketidakadilan mulai merambat, pelan dan pasti. Keserakahan mulai mendapat pembenaran. Hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Sementara pemimpin sewenang-wenang.

Para pemimpin tidak lagi jujur, tidak lagi jujur dengan rakyat yang dipimpinnya. Saat apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan apa yang mereka rasakan atau mereka pikirkan. Saat ucapan tidak lagi sama dengan perbuatan. Saat pemimpin menjadikan diri mereka penguasa yang memerintah. Saat mereka sebagai penguasa juga adalah pengusaha yang memperkaya diri mereka sendiri beserta kroni-kroninya saja. Saat penguasa dan para pemimpin bangsa korup. Saat pemimpin bukan lagi sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Saat dimana pemimpin adalah penguasa yang memerintah. Keadaan atau zaman duapara seperti itu akan segera diikuti oleh zaman kaliyuga.

4.3.1.4 Zaman Kali (Kali Yuga)

Adalah zaman pergolakan, zaman kacau, zaman keos, zaman semua warga hanya mengurus diri mereka masing-masing. Zaman kaliyuga, adalah zaman saat kelompok masyarakat berhadap-hadapan dengan kelompok masyarakat yang lain. Perang antar saudara, perang antar kelompok masyarakat yang lain. Perang antar saudara, perang antar golongan, perang antar suku bangsa berhadapan dengan suku bangsa lainnya. Kekacauan pemimpin yang lainnya. Kekuasaan diperebutkan dengan berbagai cara. Kaliyuga adalah sebuah konsekuensi logis, ikutan dari zaman duapara.

Zaman kaliyuga berakhir saat seorang pemimpin kuat dan jujur muncul. Ratu adil lahir. Seorang yang memiliki kemampuan (kekuatan), yang memiliki keberanian, yang memiliki kemauan dan komitmen, akan lahir di antara kelompok yang bertikai. Pemimpin yang diikuti oleh mereka yang menghendaki keadaan tertib kembali, karena, manusia memiliki hati nurani, memiliki akal sehat dan memiliki kemampuan untuk mencari solusi. Ada saatnya manusia capai bertikai dan capai berperang. Perang tidak pernah menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Konsensus akal sehat mereka menerima bahwa perang harus distop, diakhiri.

Hukum, perundangan dan peraturan diperbaiki dan disepakati. Perilaku pemimpin dan masyarakat harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan yang disetujui. Hukum dibuat untuk ditaati oleh semua, oleh pemimpin dan yang dipimpin. Hukum pun dipatuhi dan ditegakkan. Mereka yang melanggar hukum diadili dan dihukum sesuai dengan undang-undang.

Zaman kaliyuga kemudian berganti lagi ke zaman treta, tertib hukum, seperti telah diulas di atas.

Mengapa siklus perubahan zaman seperti di atas terkesan selalu berulang dan berulang lagi. Benarkah hal demikian memang karena kodrat alam dan kodrat manusia ? Ataukah dari kesalahan-kesalahan pendahulu-pendahulu mereka. Dan kesalahan yang sama berulang mereka lakukan. Ada kesan pesimistik di sana, tetapi bukankah di antara milyaran umat manusia lebih banyak yang optimistik.

4.3.2 Budaya Rendah Hati Bukan Rendah Diri

Tat twam asi. Dia, itu, adalah AKU juga. Karena di dalam dia, di dalam masing-masing mereka. Di dalam setiap ciptaanku adalah AKU. Karena itu, semua kamu, semua manusia adalah bersaudara. Semua makhluk manusia adalah bersaudara, satu dalam kemanusiaan, satu dalam berbumi dan satu dalam alam semesta. Hormat kepada diri sama artinya dengan hormat kepada orang lain. Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Ini adalah pesan-pesan arif dari para pendahulu-pendahulu kemanusiaan, dari para arif bijak zaman dahulu. Para tetua-tetua kita, para leluhur bangsa ini.

Budaya luhur dari para leluhur bangsa kita seperti itu hingga kini masih terpelihara dengan baik. Nampak sampai kini masyarakat kita sangat hormat menerima tamu, saat menerima wisatawan. Mereka penuh senyum, welcome, dengan hangat menerima mereka, walau belum kenal sekalipun sebelum-sebelumnya. Sayangnya, budaya luhur seperti itu mudah dan sering dimanipulasi oleh mereka

yang licik yang kurang bertanggung jawab. Budaya rendah hati kadang dianggap sebagai budaya bodoh.

Mengapa bangsa-bangsa Eropa (Belanda, Inggris, Portugis) dan juga kemudian bangsa-bangsa Arab yang semula hanya ingin berdagang (mencari rempah-rempah) sangat nyaman tinggal di bumi Nusantara ini belasan abad yang lalu. Bahkan sebagian dari mereka kemudian menjadi leluhur dari sebagian bangsa ini. Salah satunya sebab pasti karena leluhur bangsa terbuka. Karena leluhur bangsa ini, yang memiliki budaya luhur seperti itu menerima mereka dengan sangat baik. tanpa penerimaan yang baik, niscaya mereka tidak betah. Bahwa penerimaan yang baik dengan keramah-tamahan para leluhur itu kemudian dimanipulasi, bangsa ini diperdaya, ditipu, dan kemudian bahkan dijajah untuk waktu yang sangat panjang.

Budaya empati pada mereka yang lagi kurang bernasib baik, budaya ramah, budaya senyum kepada sesama (tamu/wisatawan) adalah budaya Timur yang sangat baik. Budaya seperti itu tidak banyak dijumpai di belahan barat dunia ini. Identitas sebagai bangsa yang ramah adalah sebuah pujian yang tulus. Hanya saja kita tidak ingin budaya ramah penuh senyum itu dimanipulasi sebagai budaya bodoh, sikap lemah, sikap rendah diri yang dapat diperolok, ditipu dan dieksploitasi. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa budaya tengah hati jangan dimanipulasi menjadi budaya rendah diri. Budaya rendah diri, budaya tidak percaya dengan kemampuan diri bukanlah budaya luhur. Dan jika budaya itu pernah ada dan bahkan dia sebagian dari bangsa ini ada yang menderita rasa rendah diri (harus diakui masih ada), hal demikian harus dinyatakan sebagai budaya keliru dan harus ditinggalkan

4.3.3 Budaya Pemaaf dan Mengakui Kelebihan Orang Lain

Mengakui sebuah kesalahan dan meminta maaf, bukanlah sebuah wajah indah, tetapi adalah sebuah budaya yang sangat mulia. Kejujuran mengakui sebuah kekurangan diri, walau nampaknya tidak cantik juga sangat mulia. Bukankah sebuah kebenaran tiada manusia yang sempurna. Juga, budaya berani mengakui kelebihan orang lain, respek, dan memberikan penghargaan yang pantas kepada mereka, walau terkesan merendahkan diri, juga adalah sesuatu yang sangat mulia. Mengulurkan tangan kepada sang pemenang dan mengucapkan selamat, adalah sebuah budaya yang amat luhur. Kalah, juga bukanlah sebuah kehinaan. Bukankah karena ada yang kalah, maka baru akan ada sang pemenang. Kalahpun adalah sesuatu yang terhormat, sangat terhormat.

Kebenaran memang tidak selalu manis, tidak selamanya gurih, enak. Kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang dialami dalam kehidupan seorang dewasa kadang asam, kecut, bahkan tidak jarang pahit yang harus dihadapi, harus ditelan. Kenyataan seperti itu diungkap dalam sebuah ritual budaya potong gigi (tatah gigi) saat seorang anak memasuki masa remaja/dewasa. Pesannya adalah, hadapi kenyataan hidup dewasa itu seperti apa adanya, dan pasti tidak semuanya manis.

4.3.4 Budaya Berbuat Baik itu Baik

Manusia seperti disebutkan di atas sangat sering gagal mengendalikan dan bahkan kadang sangat permisif dengan dorongan indrawi mereka. Kontrol internal melalui janji sorga bagi mereka yang berbuat baik dan tidak melanggar norma-norma

luhur, serta ancaman neraka bagi mereka yang berbuat jahat dan melanggar norma-norma agama maupun hukum, ternyata tidak sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku negatif manusia. Model janji sorga-neraka seperti yang telah dicoba ribuan tahun selama ini untuk mengajarkan agar manusia berbuat baik dan menghindarkan mereka dari perbuatan tidak baik, ternyata tidak sepenuhnya efektif. Walau kebanyakan orang takut berbuat jahat sebagian terbesarnya pasti karena takut akan hukuman api neraka yang menyiksa.

Kini banyak orang tidak lagi takut dengan ancaman neraka. Bukankah banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, wakil rakyat, pemimpin umat dan pemimpin bangsa, bahkan tokoh birokrasi di departemen agama sebuah negeri, diberitakan sangat sering diadili, dimasukkan penjara karena perbuatan yang tidak baik, seperti korupsi, mencuri uang rakyat. Tidak jarang kita mendengar di berita televisi seorang guru agama menganiaya siswanya, melakukan pelecehan seksual dan bahkan memperkosa murid yang semestinya dibimbingnya. Metode sorga-neraka saja pasti tidak cukup. Masih perlu ditambahkan dengan metoda lain, terutama pada segmen-segmen masyarakat yang lebih terdidik.

Bagaimanapun pendidikan agama masih tetap perlu diajarkan kepada umat, dengan tekanan lebih kepada aktualisasi dalam perilaku baik, dalam budi pekerti yang baik dan bukan pada melaksanakan simbol-simbol ritual yang lebih banyak memberi pemuasan rasa dan emosi. Budaya berbuat baik itu harus di didikan sejak anak-anak masih kecil, dimulai dari contoh-contoh kecil di keluarga. Berbuat baik harus dijadikan motto bagi setiap anak. Kalaulah kamu tidak mampu menjadi yang terbaik,

tetapi lakukanlah segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya, yang terbaik yang mampu kamu lakukan.

“Anda dan saya berbuat baik, bukan lagi karena dorongan mendapatkan sorga. Kita berbuat baik karena kita tahu, berbuat baik itu baik dan berbuat jahat itu jelek”, demikian sebuah kearifan yang sering diungkapkan oleh banyak bapak bangsa di berbagai kesempatan. Kita berbuat baik bukan semata-mata karena dorongan ingin mendapat sorga. Bahwa kemudian disana ada sorga, alhamdulillah, kata seorang sahabat.

Mengulangi pernyataan di depan, sorga tidak hanya ada di alam setelah kematian, tetapi sorga justru telah ada saat di alam nyata ini, di dunia ini. Saat perbuatan baik kita mampu membuat senang banyak orang. Saat kita mampu berbuat baik untuk banyak manusia lain. Seorang sahabat lain menulis “kita jangan pernah berdagang dengan Tuhan”. “Tuhan, aku akan sembah KAMU, tetapi aku mohon Tuhan,... ampuni dosa-dosa kami dan berikanlah kelak kami sorga”.Seorang pedagang dalam sebuah doanya mengatakan: “Tuhan, aku akan sedikit berbagi keuntungan kepada mereka yang kelaparan, kepada mereka yang dapat musibah, tetapi Tuhan janji, nanti kasihlah kami keuntungan yang lebih banyak lagi, keuntungan yang berlipat”.

Seorang penjudi memohon sebuah kemenangan dalam berjudinya, sementara seorang pencuri memohon perlindungan dalam pekerjaannya mencuri. Bahkan tidak sedikit para koruptor negeri ini sangat rajin berdoa dan mengunjungi tanah suci dari hasil korupsi mereka. Barangkali dalam doa mereka juga memohon agar korupsi

mereka tidak terbongkar oleh KPK (Komite Pemberantasan Korupsi). Tuhan pasti tidak butuh doa dan persembahan seperti itu. Tuhan tidak berdagang sorga. Tuhan memang menjanjikan akan ada sorga dan ada neraka, bagi umat manusia. Sekali lagi, karma, amal, dan perilaku kamu yang akan membuatkan dan mengantarkan diri kamu ke sorga atau akan membuatkan dan menyeret kamu ke neraka. Sekali lagi, *“mari kita berbuat baik, karena berbuat baik itu memang baik”*, sebuah ungkapan yang perlu didengarkan dan disebar-luaskan.

4.3.5 Budaya Menghargai Waktu

“Kalimasadha”, sang waktu yang maha sakti. Saat pagi, matahari akan terbit, tidak ada yang mampu menahannya. Sore hari, saat matahari akan terbenam juga tak ada yang dapat menundanya. Kesedihan, sakit dan kematian bila sudah dikehendaki oleh sang waktu, ia akan datang dengan sendirinya, yang sering kali tanpa permisi. Tetapi kalau kegembiraan yang datang setiap saat, itu juga karena sang waktu yang membawakan nikmat pada kita, dan pasti *welcome*.

Hanya dengan senjata “kalimasadha”nya Yudistira, Salya sang panglima perang Korawa yang tak terkalahkan dan tak terlukai oleh senjata-senjata lainnya, kemudian terbunuh. Sebuah senjata yang maha sakti, tiada seorang mampu melawannya, kalimasadha. “Kalimasadha” singkatan dari kata-kata kali, kala, waktu; ma dari kata maha; sadha, sidhi, sakti. Kalimasadha adalah sang Kala, sang waktu yang maha sakti. Sang waktu, Kala, yang tak seorang kan mampu melawan. Salya, Duryadana, Karna, Drona dan juga kita semua.

Juga Bung Karno, bapak, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Indonesia yang sangat dicintai oleh rakyatnya tak mampu melawan sang waktu. Saat sang waktu menghendaki dia jatuh, dia jatuh. Soeharto presiden Indonesia ke dua, penguasa tunggal otoriter yang didukung sepenuhnya oleh militer yang sangat ditakuti, saat sang waktu sudah menghendaki harus berhenti dan turun dari jabatan presidennya. Diapun jatuh dari kepresidenannya. Tak ada satupun mereka, saya dan juga anda kelak, bila sang waktu menghendaki harus berhenti dan dipanggil untuk menghadap DIA, yang bakal mampu melawan. Rejeki, jodoh, kelahiran, kematian bila sang waktu menghendaki mereka akan datang dengan sendirinya, datang tanpa diundang, kadang dengan tiba-tiba.

Demikian pula dengan nafsu, indrawi manusia, walau tidak mungkin dibunuh disamping memang tidak perlu dibunuh, demikian diajarkan oleh Maharsi Vyasa, satu demi satu akan mati dengan sendirinya, bersamaan dengan perjalanan sang waktu. Bukan kau yang membunuh mereka, Arjuna, tetapi, AKU, demikian diajarkan oleh maharsi Vyasa melalui sebuah dialog Kresna-Arjuna dalam buku Bhagawad Gita.

Di samping apa yang telah dipaparkan di atas masih ada sisi-sisi lain dari kebenaran tentang “waktu” yang perlu diungkapkan. “Lakukanlah pekerjaan itu sekarang juga, jangan ditunda, karena kalau ternyata hal itu baik, anda dapat mengulangnya di kesempatan lain”. Jangan menunda-nunda pekerjaan yang bisa dilakukan saat ini. Karena waktu lain yang tersisa dapat dipergunakan untuk pekerjaan atau keperluan lain. Sepasang suami-istri, menyatakan “menyesal”, segera

setelah mereka menyelesaikan bulan madu mereka. Kalau kami tahu begitu indahnya sebuah pernikahan kami. Yang terakhir ini pasti tidak perlu diikuti oleh remaja-remaja kita.

Seorang tua bertutur kepada anak-anaknya. Penggunaan hari waktu muda kamu dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari mudamu itu tidak akan pernah kembali. Jangan kamu sia-siakan hari-harimu itu. Hari kemarin tidak bisa diulang. Orang Barat konon menyatakan waktu itu adalah uang. *Time is money*. Pekerjaan mengepel lantai satu jamnya dihargai 10 dollar. Bayangkan kalau ngepelnya setiap harinya 2 jam saja, aku akan dapat honor 20 dollar. Kali satu minggu potong libur satu hari, dollarku akan jadi 120 dollar/minggu, kata seorang mahasiswa matematika yang kiriman rupiahnya seret. Wow!. Tapi, seorang mahasiswa di Jakarta meminta teman cowoknya menemaninya ke mall. “Ntar malam, temenin aku ke mall ya. Sorry ya, aku lagi sibuk, aku lagi ndak punya waktu. Sambil bisik-bisik si cowok bilang ditelinga ceweknya, “time is money”, transfer ATM ku belum masuk dari bokapku”. Dasar!

Tetapi, ingat kalau mesin yang tidak bernafas saja bisa *hyper heated*, kepanasan. Jangan dia dipaksa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mesin tetap butuh istirahat. Demikian pula halnya dengan badan dan pikiran manusia. Manusia dalam seharinya perlu istirahat beberapa jam, seminggunya perlu beristirahat minimal satu hari, paling sedikit setengah bulan dalam satu tahunnya. Manusia jangan dimekanisasi. Manusia dan bahkan semua makhluk hidup membutuhkan waktu untuk istirahat yang cukup.

4.3.6 Budaya Pengakuan Hak dan Kewajiban Azasi

Kini bangsa ini gemar berbicara tentang hak azasi. Hak azasi manusia adalah hak bagi setiap warganegara. Setiap warganegara berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum yang sama. Setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; pendidikan; perlindungan keamanan. Setiap warganegara berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan masih banyak hak-hak azasi manusia lainnya. Hak azasi manusia kini sudah menjadi bagian dari deklarasi persatuan bangsa-bangsa. Walau bukan asli budaya bangsa Indonesia, pengakuan akan hak azasi manusia sebagai sebuah ide, sebuah budaya adalah sesuatu yang baik, patut kita acungi jempol. Tetapi apakah kita yakin mengakui akan adanya hak-hak azasi setiap warga Negara, mereka benar-benar memperoleh dan menerima hak-hak mereka seperti yang diajarkan.

Ada sebuah kenyataan yang memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesadaran politik setiap warganegara semakin tinggi pula kesadaran mereka akan hak-hak azasi mereka. Karena itu, yang paling santer berbicara tentang hak azasi manusia adalah mereka dari golongan ini. Tetapi sangat disayangkan yang terjadi kemudian adalah kelompok ini bukan saja santer berbicara tentang hak azasi manusia tetapi juga tentang hak-hak lainnya khususnya yang berhubungan dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka sangat tidak peduli dengan hak-hak azasi dari mereka yang kurang beruntung, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak azasi mereka. Terutama mereka yang sangat rendah tingkat kemampuan sosial-ekonomi dan pendidikannya.

Mereka yang pada posisi kuat, malah sangat sibuk dengan memperjuangkan hak-hak mereka, hak sebagai pejabat publik, sebagai pejabat fungsional (professional), seperti hak untuk kendaraan dinas yang mewah, hak untuk memperoleh rumah dinas yang pemeliharaannya seluruhnya ditanggung oleh Negara, hak untuk memperoleh fasilitas lain dari Negara, hak untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih studi banding (?) yang sudah tentu menggunakan uang Negara.

Sementara mereka, masyarakat kebanyakan tidak atau sangat jarang berbicara dan menuntut hak-hak azasi mereka, karena disamping tidak tahu akan hak-hak mereka, juga pasti karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya. Mereka paling sering menjadi korban dan atau paling sedikit memperoleh akan hak-hak azasi mereka. Mari kita bandingkan dengan budaya asli bangsa ini yang oleh para leluhur diperkenalkan sebagai budaya “kewajiban azasi manusia” yang lebih dikenal sebagai budaya “dharma”. Berbeda dengan hak-hak azasi, yang umumnya diperebutkan, kewajiban termasuk kewajiban azasi oleh sebagian besar masyarakat sebisa-bisanya dihindari. Kewajiban azasi, kalau bisa, biasanya dicoba untuk dihindari.

Andai saja setiap warganegara dapat melakukan dan memenuhi kewajiban azasi mereka, bersamaan dengan itu hak azasi seluruh warga Negara tanpa perlu diperjuangkan pasti akan mereka terima. Termasuk oleh mayoritas warga Negara yang tidak terdidik dan mereka yang rendah kesadaran politiknya sekalipun, yang sangat tidak tahu akan hak-hak azasinya.

Apa yang dimaksudkan sebagai kewajiban azasi ?. Setiap warganegara dalam peran dan fungsi sosial apapun memiliki kewajiban azasi. Mari kita telaah beberapa contoh. Seorang anak berkewajiban untuk belajar; Seorang anak berkewajiban untuk membantu kedua orang tua mereka khususnya dalam upaya membesarkan dan mendidik mereka. Seorang anak berkewajiban patuh dan hormat kepada orang tua mereka. Seorang anak berkewajiban untuk patuh dan hormat kepada guru-guru mereka.

Terkait dengan contoh di atas yang berimplikasi dengan hak azasi, orang tua berkewajiban membesarkan dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Orang tua wajib menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak mereka. Orang tua wajib menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada pendidikan tertinggi yang mampu dikuasai oleh anak-anak mereka. Kewajiban azasi orang tua di satu sisi akan berimplikasi sebagai hak azasi yang otomatis diterima oleh seorang anak.

Masih terkait dengan hak azasi yang akan diterima oleh seorang anak adalah adanya kewajiban-kewajiban azasi yang dilekatkan pada seorang guru. Kewajiban azasi seorang guru adalah: belajar secara terus menerus dibidang yang dituntutkan kepadanya sebagai guru. Guru wajib menyiapkan bahan ajaran yang akan diberikan setiap saat sebelum guru masuk kelas. Guru wajib mengajarkan bahan pelajaran sampai anak didik mengerti betul akan pelajaran yang diajarkannya. Guru wajib menjadi model dan member contoh-contoh berperilaku baik kepada anak didiknya.

Bersamaan dengan guru-guru yang melakukan kewajibannya dengan baik, setiap guru pasti akan menerima hak-haknya sebagai guru jikalau pemerintah atau

birokrasi sekolah juga melakukan kewajiban azasinya dengan baik pula, memberikan penghargaan yang wajar yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan seorang guru. Masih sangat banyak contoh-contoh konkrit yang bisa dielaborasi sebagai kewajiban-kewajiban azasi yang secara langsung berimplikasi kepada pemberian hak-hak azasi setiap warganegara. Dalam bahasa daerah (Jawa-Bali) kewajiban azasi ini lebih populer disebutkan sebagai “dharma” orang tua; dharma seorang guru; dharma pandita; dharma seorang bupati; dharma seorang gubernur; dharma seorang menteri; dharma seorang presiden dan dharma pejabat-pejabat publik lainnya dan professional-professional lain-lainnya. Termasuk kemudian kewajiban (dharma) warga masyarakat/warga Negara adalah membayar pajak bagi yang memiliki penghasilan yang dalam batas kena pajak; membela bangsa dan Negara saat dibutuhkan; mengingatkan dan mengontrol para pejabat melalui mekanisme yang disepakati dll.

Sekali lagi, andai saja setiap warga Negara dalam kapasitas peran dan fungsi apapun mereka, mampu melakukan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya, pasti pada gilirannya semua warga Negara akan memperoleh hak-haknya terutama dalam hak-hak azasi mereka. Bukankah yang terakhir ini sebuah model yang tidak kalah baiknya atau bahkan mungkin lebih baik dan lebih efektif dibandingkan dengan budaya yang lebih menekankan pada perjuangan hak-hak azasi yang lebih sering hanya bermuara pada perebutan hak-hak mereka yang menyadari dan memiliki kemampuan untuk memaksakan akan hak-hak mereka. Dan bukan untuk mereka yang mayoritas tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya.

4.3 Fungsi Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Beragama di Bali

Perspektif fungsional lebih memahami kearifan lokal dari perspektif kemampuan masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Parsons dalam Sibarani (2012:116) menyatakan bahwa fungsi-fungsi tersebut menjadi fungsional ketika masyarakat melalui sistem tindakan sosial berupaya mewujudkan tujuan rasional yang ingin dicapai. Setiap masyarakat tentunya berbeda dalam menggunakan *means* (alat atau cara) dalam bentuk sistem tindakan, tujuan yang hendak dicapai serta fungsi-fungsi yang berhasil dilaksanakan. Perbedaan ini menghasilkan berbagai keunikan masyarakat. Pada persoalan inilah maka kearifan lokal memahami keunikan fungsional sebagai salah satu dimensi yang sangat penting.

Berdasarkan pengamatan, wawancara mendalam, dan studi pustaka, maka fungsi revitalisasi kearifan lokal adalah sebagai berikut.

4.4.1 Fungsi Kedamaian

Istilah kedamaian berkaitan dengan tiga hal, yaitu kerukunan, keamanan, dan kenyamanan. Masyarakat dan daerah yang damai berarti Masyarakat dan daerah yang penduduknya hidup dengan harmonis, yang aman dari kejahatan dan konflik, dan yang penduduknya dapat tinggal dengan tenang. Kedamaian hanya dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki kepribadian yang baik. Kebaikanlah yang menjadi persyaratan mutlak untuk terwujudnya masyarakat yang damai.

Salah satu sumber kebaikan adalah nilai budaya yang terdapat dalam tradisi lisan atau tradisi budaya. Nilai budaya itu tersusun dalam berbagai bentuk tradisi lisan atau tradisi budaya, seperti tradisi berbahasa, berpantun, bercerita rakyat, melaksanakan adat istiadat, melakukan upacara ritual, dan mengerjakan benda-benda budaya. Pemahaman tradisi budaya untuk menggali nilai budaya menumbuhkan teori dan metode tertentu. Hal ini sangat dibutuhkan terutama untuk menggali dalam mendapatkan nilai budaya yang menjadi kearifan lokal suatu komunitas.

Kebaikan secara aksiologi akan bermanfaat untuk menciptakan kedamaian yang mencakup kerukunan, keadilan, kenyamanan, dan keamanan dalam komunitas. Apabila orang-orang dalam satu komunitas memiliki kepribadian yang baik, maka komunitas itu akan damai, rukun, adil, nyaman, dan aman. Dalam hal ini kebaikan yang dimaksud adalah kepribadian yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku atau corak tingkah laku sosial seorang individu yang merupakan gabungan keseluruhan sifat-sifat yang tampak dalam berinteraksi dalam suatu komunitas. Kepribadian mungkin saja baik, tetapi mungkin saja jahat. Itulah sebabnya kadang-kadang disebut dengan istilah kebaikan untuk mengacu pada kepribadian yang baik.

Kebaikan sebagai dasar kedamaian mencakup banyak hal seperti kejujuran, kesopansantunan, kesetiakawanan, kerukunan, dan resolusi konflik, komitmen, rasa syukur, dan pikiran positif. Jadi kearifan lokal merupakan salah satu kearifan inti. Konsep kedamaian pada hakikatnya terdapat dalam tradisi lisan atau tradisi budaya

dalam berbagai etnik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Gede Sura sebagai berikut.

“menjaga keharmonisan dalam konteks social seringkali orang tidak mengedepankan kebenaran , karena kebenaran tidak selalu membawa kedamaian, tetapi sebaliknya mengedepankan kedamaian di atas kebenaran. Jadi untuk mendapatkan kedamaian kita harus sabar dan mau mengalah (*sing ade lemete lung, yeneng kekeh sinah sube lakar lung*) yang artinya jika marah lawan dengan marah maka kita akan berantem atau berkelahi.(wawancara, 12 Agustus 2013).

Memperhatikan ungkapan informan di atas, bahwa kedamaian akan dapat terwujud apabila semua orang mengedepankan kesabaran dalam menyelesaikan masalah, dan jika semua orang emosi dalam menyelesaikan masalah sudah tentu keributan yang akan didapat. Oleh karena itu jalan terbaik dalam penyelesaian masalah adalah dialog yaitu duduk bersama dengan kepala dingin. Hal ini berkaitan dengan pendapat Suharlin dalam Ngurah (2010: 412) sebagai berikut. Bahwa kehidupan dialogis masyarakat beragama di Bali telah berlangsung sejak jaman kerajaan dahulu. Hal ini terbukti dengan peninggalan sejarah yang terkait dengan ajaran Siwa dan budha, adanya tempat pemujaan di beberapa pura di Bali sebagai simbol kerukunan, baik antara umat beragama maupun internal umat beragama itu sendiri. Jadi di dalam dialog ada pesan-pesan yang sangat penting untuk diikuti sebagai tradisi budaya masyarakat Bali. Hal ini dimaksudkan bahwa orang tetua-tetua kita dahulu saja bisa melakukan kenapa kita sekarang tidak mampu.

Upaya untuk mewujudkan kedamaian di Bali, salah satunya adalah pemahaman terhadap eksistensi kearifan lokal yang ada. Karifan lokal yang sudah

disepakati seperti *menyama braya*, saat ini tinggal dimantapkan dan disosialisasikan secara merata dan berkelanjutan, sedangkan kearifan lokal yang lain perlu digali, kemudian disepakati sebagai pedoman dalam memelihara kedamaian dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan program “Bali Mandara” ataupun Bali *clean and green* sangat perlu dipahami dan disepakati kearifan lokal Bali tentang *tri hita karana*. Bilamana perlu kearifan lokal yang digali dan dikaji sebagai bentuk revitalisasi, dapat dijadikan pedoman bersama dalam kehidupan beragama, dan tidak hanya sebagai slogan tetapi juga difahami serta dilaksanakan, baik dalam bentuk cerita rakyat, nyanian tradisional, dan perilaku-perilaku yang dapat diteladani.

Upaya-upaya lainnya adalah agar kerukunan yang sudah tercapai bisa dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan dengan lebih mendalami ajaran agama dan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan dasar untuk hidup bersama saling berdampingan secara damai dan harmonis, serta saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan.

4.4.2 Fungsi Kesejahteraan

Kearifan lokal yang berkenaan dengan kesejahteraan digali dari nilai budaya leluhur yang membicarakan tentang perlunya kesejahteraan manusia. Secara morfologis kata kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti dalam keadaan aman, sentosa, makmur, dan selamat. Kesejahteraan di sini berarti terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran, baik secara primer maupun secara sekunder. Kesejahteraan merupakan keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan

hidup, khususnya yang bersifat mendasar, seperti makanan, minuman pakaian, perumahan, pendidikan keamanan, dan kesehatan. Namun secara umum kata sejahtera kemudian mengerucut pada tiga keadaan kondisi manusia yakni keadaan makmur, sehat, dan damai. Pada perkembangan berikutnya, istilah kesejahteraan sekarang ini lebih didominasi oleh makna kemakmuran terutama secara ekonomis, sehingga kata sejahtera semakin mengerucut lagi dengan pengertian kaya. Kesejahteraan ini sering direfleksikan berdasarkan kehidupan ekonomi seseorang yang dipercaya dapat membawa kebahagiaan dalam kehidupannya. Atas dasar itu, kesejahteraan adalah suatu keadaan ekonomis yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia atau masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan informasi, dan kebutuhan sarana prasarana.(Sabarani, 2012:186).

Ada ungkapan orang Bali terkait dengan kesejahteraan itu adalah geguritan dengan pupuh pucung sebagai berikut.

“Bibi anu lamon payu luas manyus,
Antenge tekegang yatnain ngabe masui,
Tiyuk puntul bawang anggen sesikepan

Artinya: Saudara kalau ingin menyucikan diri,

Lakukan swadharma yang baik,
Siapkan sesuatu untuk proteksi diri,
Asah intelektual untuk bekal hidup

Ungkapan geguritan pucung di atas merupakan tradisi budaya masyarakat Bali yang sering disampaikan oleh tetua-tetua kita di jaman dulu agar senantiasa giat

bekerja dan tidak menjadi orang pemalas. Jadi siapapun yang ingin hidup sejahtera, maka sedini mungkin menyiapkan diri sebagai bekal hidup di kemudian hari. Masih ada lagi satu pupuh ginanti yang memberikan inspirasi terkait dengan kesejahteraan sebagai berikut.

*“Tambete ngawinang lacur, bulak balik manumadi,
Bingkih melaibin duka, dekah nguber suka hati,
Ngalih idup mati bakat, ngalih bajang tua panggih”.*

Artinya: Kebodohan itu yang menyebabkan kemiskinan, akan menjadikan orang itu hidupnya tidak menentu. Berusaha untuk menghindari kesusahan, dengan mengejar nafsu atau keinginan. Namun ingin hidup sejahtera tapi kematian yang didapat dan ingin tetap hidup seperti orang muda tetapi tua yang didapat.

Ada ungkapan logis yang menghubungkan kegigihan bekerja dengan kesejahteraan dan martabat bangsa. “Semakin gigih bekerja, semakin besar mata pencaharian; semakin semakin besar mata pencaharian, semakin tinggi pendapatan; semakin tinggi pendapatan, semakin sejahtera kehidupan; semakin sejahtera kehidupan, semakintinggi taraf hidup; semakin tinggi taraf hidup, semakin tinggi martabat bangsa. Ungkapan logis kausatif itu menandakan bahwa etos kerja dan kesejahteraan sangat berkorelasi signifikan. Seseorang dengan atau tanpa bantuan orang lain harus bekerja keras untuk meningkatkan mata pencaharian, memperbanyak sumber-sumber mata pencaharian, sehingga akan mempertinggi pendapatan sebagai upah dari kerja keras itu. Dalam usaha pendapatan adalah sejumlah uang yang didapat

seseorang dari aktivitasnya melalui keuntungan perusahaan, yang kebanyakan dari penjualan produk/atau jasa kepada pelanggan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan adalah sejumlah uang yang didapat oleh seseorang dari hasil kerjanya yang kebanyakan dari penjualan hasil mata pencahariannya atau jasanya melalui kerja kerasnya.

Kesejahteraan bukan datang dengan sendirinya, tetapi tergantung dari kegigihan atau etos kerja seseorang, sehingga setiap individu atau kelompok masyarakat tidak mungkin memiliki kesejahteraan yang sama. Kearifan lokal kita seperti gotong royong dengan berbagai bentuknya dapat diintensifkan dan direvitalisasi untuk mewujudkan sosialisasi itu. Kalau sudah tercipta sumber daya manusia yang selalu mendambakan kesejahteraan dengan disertai etos kerja dan disiplin kerjanya sehari-hari, dia akan dapat meningkatkan kesejahteraannya secara perlahan-lahan.

Berdasarkan warisan tradisi budaya para leluhur sebenarnya telah memikirkan kesejahteraan pada generasi selanjutnya. Hal itu terbukti dalam pikiran-pikiran, gagasan, dan cita-cita luhur yang tercermin dalam berbagai tradisi. Lisan seperti ajaran *tri hita karana* di Bali yang menghubungkan manusia dengan Tuhan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.

Terkait dengan kesejahteraan, informan I Nyman Chaya dalam petikan wawancara menyampaikan sebagai berikut.

“mewujudkan kesejahteraan dunia adalah representasi atas tujuan yang ingin dicapai sekarang. Tujuan memang mungkin begitu absurd, karena bagaimana istilah kesejahteraan itu sendiri memiliki banyak arti tergantung

bagaimana setiap orang memandangnya, juga tergantung dalam situasi apa orang tersebut menggagasnya” (Wawancara, 1 September 2013).

Berdasarkan narasi di atas, jika dikaitkan dengan pendapat Amrih (2008:72-73), mengatakan bahwa mewujudkan kesejahteraan dunia adalah sebuah tujuan hidup seseorang. Bila dikatakan demikian, bisa jadi terdengar klise, teoretis, dan sesuatu yang absurd untuk dilakukan. Pernyataan ini bisa muncul dari berbagai kalangan, dari mulut jru kampanye bila menjelang msim pemilu tiba, baik itu pemilu daerah, pusat, legislative maupun eksekutif. Mungkin kalimatnya tidak sama persis seperti itu, tapi siratan maknanya bisa dikonotasikan demikian.

Pernyataan di atas menggarisbawahi bahwa visi, misi dan tujuan hidup manusia atau komunitas sangat berpengaruh dalam memotivasinya. Dengan demikian, Dengan demikian dalam usaha mempersiapkan kehidupan generasi masa depan dengan kehidupan yang lebih sejahtera, sebaiknya berdasarkan visi komunitas itu. Visi itu merupakan tujuan yang dicita-citakan, sesuatu yang diimpikan untuk menjadi kenyataan. Dalam hal ini hamper semua bangsa mendambakan masyarakat sejahtera. Berdasarkan warisan tradisi budaya para leluhur sebenarnya telah terpikirkan kesejahteraan pada generasi selanjutnya. Hal ini terbukti dalam pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan cita-cita luhur yang tercemin dalam berbagai kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

4.4.3 Fungsi Pelestarian

Di Bali, budaya dan agama Hindu menjadi dua fenomena dalam satu realitas. Transformasi kebudayaan menuju tradisi religious terjadi begitu apik dalam ruang Hinduisme yang menebarkan aroma harmoni budaya dan agama. Fenomena budaya muncul sebagai ekspresi kebenaran (*satyam*), kesucian (*sivam*), dan kebahagiaan (*sundaram*) menu realitas absolute (*Brahman*). Berbasis persembahan suci (*yajna*) masyarakat Hindu di Bali menyelaraskan gerak kehidupan adat dan budaya menjadi kesatuan rasa (keindahan), agama (tradisi suci), dan *buddhi tepet* (kebijaksanaan). Ekspresi religious dalam beraktifitas berkebudayaan inilah menjadikan agama Hindu di Bali menjadi unik dan khas. Bukan merujuk kepada Veda, tetapi mengalir dari Veda. Bukanlah agama yang hanya tekstual, tetapi agama yang dihayati dan dilaksanakan dalam konteks, sehingga nilai-nilai agama menginternal menjadi kepribadian dan jati diri pemeluknya.

Perpaduan tradisi lokal dan Hinduisme memang menjadi karakter khas Hindu Indonesia umumnya dan Bali khususnya. Melalui proses dialektis yang panjang dan berliku, maka agama Hindu di berbagai daerah menunjukkan keunikan dan kekhasannya sendiri, tetapi esensinya tunggal. Bali mewarisi ritual keagamaan yang beberapa diantaranya kental dengan nuansa lokal seperti, *tumpek landep*, *tumpek wariga*, *tumpek uye*, *tumpek kuningan* dan lain-lain. Masyarakat Hindu di Bali sangat memperhatikan lingkungannya seperti perayaan *tumpek* sebagai kearifan lokal yang sampai saat ini dipertahankan. Hal ini merupakan wujud revitalisasi kearifan lokal

yang selama ini sangat banyak bergeser baik bentuk, fungsi, maupun maknanya yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi.

Dalam alam tradisi di Bali, sudah dikenal adanya pengelompokan tata guna tanah yang tercermin dalam *Tri Angga* (kepala, badan, dan kaki) dan tata letak bangunan seperti tercermin dalam lontar Asta Gumi, yang saat ini dikenal dengan zoning tata guna tanah/lahan, master plan, detail plan, denah plan, dan sebagainya (Mudra, 2010). Hal senada sebagaimana disampaikan oleh informan Ketut Wiana dalam petikan wawancara sebagai berikut.

“Tri Angga dalam arti harafiah merupakan tiga bagian badan yang mengandung tiga nilai yang didasarkan pada garis vertical, dan garis horizontal, yaitu utama angga, Madya angga, kanista angga. Berdasarkan garis vertical umumnya utama angga adalah bagian atas, madya angga bagian tengah, dan kanista angga bagian bawah, sedangkan garis horizontal pada umumnya diwujudkan gunung (*utama anngga*), daratan (*madya angga*), dan laut (*kanista angga*). Nilai-nilai tradisional Tri Angga ini diterapkan oleh masyarakat Bali dalam penataan pekarangan rumah, sehingga pola penataan pekarangan tradisional Bali secara garis besar dibagi menjadi tiga (*pahrayangan, paumahan, dan pakarangan*) (Wawancara, 25 Oktober 2013).

Berdasarkan ungkapan informan di atas, bahwa manusia dan alam dapat dipisahkan. Manusia dengan alam saling *beriyadnya*. Dalam kitab Bhagawadgita III menyatakan, “*evam prawartitam cakram, na nuwartayatiha ha yah, aghayur indriyaramo moghampartha, sa jiwani*”. Barang siapa yang tidak memutar cakrayadnya ini, sesungguhnya ia adalah penjahat. Makna kutipan sloka di atas, sangat luas sekali dalam kaitan manusia dengan alam, tujuannya agar ada kesadaran dari manusia bahwa tanpa yadnya dari alam, manusia tidak dapat mewujudkan tujuan hidupnya. Pelestarian dapat diwujudkan melalui upaya ritual keagamaan yang

menjadi aspek supra-empiris. Salah satu implementasinya dalam masyarakat adalah melalui upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan berbagai kearifan lokalnya yang sampai saat sekarang masih dipertahankan.

Artadi dalam bukunya berjudul “Kebudayaan Spiritual (2011:85-86) dijelaskan bahwa religi adalah wujud alam transenden yang inti dan sifatnya adalah iman dan kepercayaan. Makna religi adalah ketentraman jiwa, tetapi makna tersebut tidak dengan sendirinya terjadi, namun religi harus dijalankan oleh manusia agar sampai pada makna kehidupannya yaitu ketentraman jiwa. Pelaksanaan religi adalah dengan cara-cara manusia dimana religi meresap ke dalam tingkah laku manusia dan tampak dalam tata lahir. Pada saat religi dijalankan dan tampak pada tata lahir, maka pada saat itu religi menjadi kebudayaan yang dapat berwujud kitab suci, upacara, simbol-simbol keagamaan, benda-benda suci dan lain-lain.

Uraian di atas berkaitan pula dengan pendapat informan I Dewa Ketut Djareken dalam petikan wawancara sebagai berikut.

“walaupun perkembangan zaman semakin pesat yang diakibatkan oleh pengaruh globalisasi dan menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk tatanan nilai kearifan lokal yang ada di Bali saat ini, namun orang Bali tidak pernah berhenti melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan tradisi-tradisi yang dimiliki yang sejak lama diwarisi dari para leluhurnya. Kami sebagai masyarakat di Desa Bungkulan senantiasa mengajak generasi muda untuk tetap melakukan tradisi-tradisi leluhur yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dalam arti tidak mengurangi makna dari tradisi-tradisi itu sendiri. Kita jangan diperalat oleh teknologi, tetapi kita yang harus memeralat teknologi itu” (Wawancara, 5 Juli 2013).

Memperhatikan narasi-narasi di atas, bahwa cara-cara untuk melestarikan kearifan lokal dalam bentuk produk-produk kebudayaana yang sudah diresapi oleh

religi, walaupun religi sudah berubah sehingga produk-produk itu dianggap tidak mengandung nilai kebenaran lagi adalah dengan memandang bahwa produk-produk religi yang telah lalu mengandung nilai-nilai kebenaran silam, dan kepada generasi masa kini tidak diberikan hak untuk melenyapkan masa silam, tetapi masa silam mempunyai hak untuk mengalir lebih dalam ke masa silam sesuai dengan kodrtanya, bahkan tidak jarang masa silam muncul lagi sebagai siklus jika alam menghendki demikian.

4.4.4 Fungsi Pendidikan

Salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan kearifan lokal adalah Bali. Provinsi Bali memiliki masyarakat yang sangat kreatif, inovatif, aktif, serta menghasilkan beberapa karya positif guna dikembangkan, diciptakan, serta dipasarkan kepada publik baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Dengan kekayaan kearifan lokal itulah masyarakat Bali dikenal dan dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun wisatawan manca Negara. Kebudayaan Bali memiliki identitas yang jelas, yaitu budaya ekspresif yang termanifestasi secara konfiguratif yang mencakup nilai-nilai dasar yang dominan seperti nilai religious, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmoni dan nilai keseimbangan (Geriya dalam Ardika, 2007). Kelima nilai dasar tersebut ditengarai mampu bertahan dan berlanjut menghadapi berbagai tantangan pada era globalisasi ini.

Hal di atas sebagaimana disampaikan oleh I Nyoman Chaya dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Kearifan lokal masyarakat Bali yang berhubungan dengan bidang kesenian, kerajinan, pertanian, tradisi, sastra, hukum, ekonomi, teknologi, perdagangan, dan sebagainya dapat dilihat secara langsung oleh wisatawan. Dalam bidang kesenian misalnya, masyarakat Bali memiliki seni megoak-goakan, berbagai seni tari, seperti drama gong, seni genjek, seni cak, seni janger, joged bumbung, seni arja, dan lainnya. Adapula seni bangunan seperti bangunan bale, jineng, kori, angkul-angkul, candi bentar, gedong, meru, padma, dan lainnya yang ada di Bali” (Wawancara, 25 September 2013).

Memahami keterkaitan antara kearifan lokal dan pendidikan, Sayuti (2005) mengatakan bahwa kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai pilar bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar. Budaya etnik lokal sering berfungsi sebagai sumber atau acuan bagi penciptaan-penciptaan baru, seperti dalam bahasa, seni, tata masyarakat, teknologi dan sebagainya, yang kemudian ditampilkan dalam prikehidupan lintas budaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsure budaya. Oleh karena itu budaya tidak pernah lepas dari proses pendidikan.

Dengan selalu memperhatikan kearifan lokal melalui pendidikan budaya niscaya manusia (masyarakat) dididik untuk tidak terperangkap dalam situasi keterasingan budaya. Oleh karena itu modal social yang tumbuh sebagai inisiatif masyarakat lokal perlu terus difasilitasi, diperkuat, dikembangkan dan didayagunakan. Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat mampu mewujudkan harmonisasi dan keserasian social. Jika nilai – nilai kearifan lokal tersebut berhasil ditanamkan lewat pendidikan yang berfungsi

menceerdaskan kehidupan bangsa, maka akan dihasilkan pula manusia-manusia yang berdaya guna dalam kehidupan manusia yakni yang sadar budaya.

Masih terkait dengan fungsi pendidikan, maka dapat dipetik hasil wawancara dengan informan I Ketut Wiana sebagai berikut.

“Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara *inheren* lewat pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai upaya membangun identitas bangsa, dan sebagai semacam menyaring (*filter*) dalam menyeleksi pengaruh budaya yang lain. Nilai-nilai kearifan lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identitas bangsa” (Wawancara, 27 Agustus 2013).

Berdasarkan paparan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara *inheren* lewat pendidikan dapat dikatakan sebagai revitalisasi atau gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian membangun identitas bangsanya, sebagai penyaring dan menyeleksi pengaruh budaya asing. Oleh karena itu menjadi sangat penting menggali kearifan lokal tersebut dan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal itu sebagai pilar sosial budaya dalam pendidikan khususnya bagi umat Hindu di Bali.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Persepsi masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu telah menyadari bahwa kearifan lokal telah banyak terlupakan, namun sampai saat ini telah banyak upaya untuk mempertahankan hal itu melalui berbagai aktivitas seperti penusunan awig-awig desa pakraman, mengoptimalkan pelaksanaan upacara-upacara agama dengan berbagai tradisi yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi pengaruh globalisasi yang melanda generasi muda sebagai pewaris budaya.
2. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Bali saat ini sangat banyak seperti; (1) budaya zaman, bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal (langgeng) dan semuanya akan berakhir hal ini merupakan bentuk pertanda alam. (2) budaya rendah diri bukan rendah hati. Bentuk ini dapat dijumpai dalam lagu-lagu (*tembang* di Bali). (3) budaya pemaaf dan mengakui kelebihan orang lain. Bentuk ini banyak ditemukan dalam dongeng yang masih hidup di Bali. (4) budaya berbuat baik itu baik. Bentuk ini banyak ditemukan dalam syair-syair. (5) budaya menghargai waktu. Bentuk ini juga banyak dijumpai dalam lagu-lagu Bali. (6) budaya

3. kengakuan hak dan kewajiban. Bentuk ini banyak dijumpai dalam dongeng.
4. Fungsi revitalisasi kearifan lokal adalah (1) fungsi kedaamaian yaitu secara aksiologi akan bermanfaat untuk menciptakan kedamaian yang mencakup kerukunan, keadilan, kenyamanan, dan keamanan dalam komunitas. (2) fungsi kesejahteraan ini berarti terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran, baik secara primer maupun secara skunder dapat terpen uhi. (3) fungsi pelestarian dapat diwujudkan melalui upaya ritual keagamaan yang menjadi aspek supra-emperis. Salah satu implementasinya dalam masyarakat adalah melalui upacara yang dilaksanakana oleh masyarakat dengan berbagai kearifan lokalnya yang sampai saat sekarang masih diperetahankan. (4) fungsi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat mampu mewujudkan harmonisasi dan keserasian social. Jika nilai – nilai kearifan lokal tersebut berhasil ditanamkan lewat pendidikan yang berfungsi menceerdaskan kehidupan bangsa, maka akan dihasilkan pula manusia-manusia yang berdaya guna dalam kehidupan manusia yakni yang sadar budaya.

5.2 Saran

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kearifan lokal yang masih ada perlu dijaga dan dilestarikan, sehingga tidak kehilangan jati diri sebagai manusia Bali.
2. Masyarakat Bali harus mampu mempersiapkan lahirnya generasi baru sebagai pewaris budaya yang fungsional, total, dan daya lentur yang tinggi dalam menghadapi globalisasi.
3. Bagi kalangan akademisi diharapkan adanya penelitian lanjutan yang mengkaji masalah terkait dengan kearifan lokal secara lebih khusus dan kompleks, sehingga nantinya dapat dibangunnya kembali budaya-budaya lokal yang dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin, 2005. *Agama dalam Kehidupan Manusia, "Pengantar Antropologi Agama"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alit Udayana, I Dewa Gede, 2010. *Pesan-Pesan Kebijaksanaan Bali Klasik: Dalam Dongeng, Lagu, Syair, dan Pertanda Alam*. Denpasar: PT. Offset BP.
- Amrih, Pitoyo. 2008, *Ilmu Kesrifan Jawa*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Ardika, I Wayan. 1996. *Bali Dalam Sentuhan Budaya Global Pada Abad Masehi.dalam dinamika kebudayaan Bali*. I Wayan Ardika dan Made Sutaba (ed). Denpasar: Upada Sastra.
- , 1994. *Sekaa Dalam Kehidupan Masyarakat Bali, Dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Hal 111 s/d 133. Oleh I Gede Pitana Ed. Denpasar: BP.
- Aunillah, Nurul Isna 2011. *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Laksana.
- Bagus, I. G. N. 1975. *Kebudayaan Bali, dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Koentjaraningrat (ed). Jakarta: Djambatan.
- , 1982. *Kebudayaan Bali dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Koentjaraningrat (ed). Jakarta: Djambatan.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Engliwood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Dharmayuda, I Made. S. I Wayan K. Cantika. 1991. *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Dister, Nico Syukur, 1982. *Pengalaman dean Motivasi Beragama: Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: Lapenas.
- Geertz, Clifford. 1959. Form and Variation in Balinese Village Structure. Dalam *JurnalAntrofologi*, Vol XI.
- , 1982. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Karnisius.
- Goode, William J. 1991. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hendarti, Paulina Ratna. 1975. *Perbedaan Orientasi Nilai Budaya Antara Generasi Muda dan Orang Tua Golongan Keturunan Cina*. Jakarta: Padamu Negeri.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kersten, J. 1984. *Bahasa Bali Tata Bahasa dan Kamus Bahasa Lumrah*. Flores: Nusa Indah.
- Koentjaraningrat, 1985. *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lin, Nan, 1976. *Foundations of Social Research*. New York : Mc Graw-Hill Book Company.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya 2 Jaringan Asia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mantra, I.B.1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Moleong, Lexy. J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Remadja Karya.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1995. *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parimarta, I Gede. 1996. *Perubahan Sosial Dalam Organisasi Desa di Bali, dalam Lontar 02, 1996*. Denpasar. Dokumen Budaya Bali.
- Pitana, I Gede (Editor), 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar:BP.
- Rahyono, F.X. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Saerosi, M.2003. *Politik Pendidikan Agama Dalam Pluralisme*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sibarani, Robert, 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

- Sayuti, Sumianto A. 2005, Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara “Yang Lain” dan Kearifan Lokal. <http://www.semipalar.net/artikel134.htm1>. Diunduh tanggal 20 Oktober 2013.
- Spradly, James, 1980. *Particivition Observation*. Hot, USA : Rinehart and Winston.
- Suamba, I Gede. 2011. *Pencarian Ke Dalam Diri, merajut budaya luhur bangsa, tinjauan filsafat cerita Mahabharata dan Ramayana*. Bandung: Yayasan Dajan Rurung Indonesia.
- Sudjangi, 1994/1995. *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Balitbang Departemen Agama
- Sumartana, TH. 1995. *Konfusianisme di Indonesia dalam Pergaulan Mencari Jati Diri*. Halaman XV-XXIV. Jakarta: Mataklin.
- Sumardi Mulyanto, dkk. 1982. *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*. Jakarta: Sinar harapan
- Triguna Yudha, 2000. *Teori Tentang Simbol*. Denpasar: Wdya Dharma
- Tunas Bangsa. 1989. *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Vicker Adrian, 2009. *Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*, Denpasar: Udayana University PRESS.
- Wibowo Fred. 2007. *Kebudayaan Menggugat*. Yogyakarta: Pinus Book Pabliher.

DAFTAR INFORMAN

1. NAMA : Dewa Ketut Djareken
UMUR : 60 Tahun
PEKERJAAN : Pesiunan PNS/ Penterjemah Lontar.
ALAMAT : Desa Bungkulan, Buleleng, Singaraja.

2. NAMA : I Nyomon Chaya
UMUR : 60 Tahun
PEKERJAAN : PNS/Pengajar
ALAMAT : Desa Kalisada, Buleleng, Singaraja.

3. NAMA : I Ketut Wiana
UMUR : 68 Tahun
PEKERJAAN : Pemsinan PNS/ Pengajar/ Penulis. Penceramah.
ALAMAT : Br. Ketapean, Denpasar.

4. NAMA : I Gusti Made Ngurah
UMUR : 65 Tahun
PEKERJAAN : PNS/ Pengajar/ Pengajar/ Penceramah
ALAMAT : Jln. Ratna, Tatasan Denpasar

5. NAMA : I Gede Sura
UMUR : 70 Tahun
PEKERJAAN : Pensiunan PNS/ Penceramah
ALAMAT : Jln. Kecubung Denpasar

LEMBAR IDENTITAS

1	Judul Penelitian	:	Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Beragama Bagi Umat Hindu di Bali
2	Bidang Ilmu	:	Humaniora
3	Nama Peneliti	:	Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.
4	Nip	:	19570310 198402 1 001
5	Pangkat/ Gol. Ruang	:	Pembina Utama Muda/ IVc
6	Jabatan Akadmik	:	Lektor Kepala
7	Tempat Tugas	:	IHDN Denpasar
8	Alamat Kantor	:	Jln. Ratna No. 51, Tatasan Denpasar
9	Alamat Rumah	:	Jln. Antasura, gg. Gitasura, No.2 Peguyangan Kaja Denpasar Utara.
10	HP	:	081338040886
11	Email	:	nengahlestawi @ gmail.com

Denpasar, 1 Mei 2013

Peneliti

Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.
NIP 19570310 198402 1 01

Denpasar, 2 Agustus 2013

Nomor : -
Lampiran : 1 gabung
Prihal : Usulan Proposal Penelitian

Kepada Yth,
Dirjen Bimas Hindu
Kementerian Agama RI
di
Jakarta

Om Swastyastu,

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan usulan proposal penelitian hibah dengan judul: "Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Beragama di Bali". Besar harapan saya semoga dapat kiranya dipertimbangkan dalam seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2013.

Demikianlah permohonan saya, atas perhatian serta bantuan Bapak saya haturkan terima kasih.

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om

Hormat,

Dr.Drs. I Nengah Lestawi, M.Si.
NIP 19570310 1984021 001